

**PDK**

## **LAPORAN AKHIR**

**Model Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Mewujudkan Good Governance dalam  
Penyelenggaraan Pemerintahan di Aras Lokal  
(Studi Kasus Gerakan Sosial Malang Corruption Watch (MCW) di Kota Malang)**



**Tim Pengusul Penelitian**

**Ketua : Drs. Jainuri, M.Si.**

**Anggota : Salahudin, S.IP. M.Si.**

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**TAHUN 2014**

**MODEL GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT SIPIL**  
**MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DI ARAS LOKAL**  
**(Studi Kasus Gerakan Sosial Malang Corruption Watch (MCW) di Kota Malang)**

**A. PENDAHULUAN**

Gerakan reformasi 1998 menuntut adanya perubahan dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Gerakan ini menghendaki kehidupan politik dan pemerintahan harus didasari oleh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dijadikan sebagai kata kunci perjuangan masyarakat Indonesia untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto. Masyarakat Indonesia menginginkan adanya perubahan kehidupan politik dan pemerintahan yang lebih terbuka, berkeadilan, dan menunjungtinggi nilai-nilai persamaan dalam kehidupan bangsa dan negara. Dengan kehidupan demikian perilaku korup dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan penguasa dapat dihindari sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai dan dirasakan semua lapisan masyarakat Indonesia. Untuk mencapai nilai-nilai baik ini tidak cukup hanya menggulingkan kekuasaan semata namun harus diikuti tindakan-tindakan nyata semua pihak terutama melakukan reformasi hukum, reformasi struktur politik dan pemerintahan, dan reformasi budaya.

Reformasi hukum adalah upaya merubah konstitusi negara yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Di awal tahun 1999, pasca bergulirnya kekuasaan Soeharto, dibawa bendera reformasi semua elemen bangsa berjuang keras untuk melakukan reformasi hukum. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali sehingga mendorong perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih luas hingga ke tataran teknis. Negara dan elemen masyarakat berupaya keras mendesain

peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi. Upaya-upaya negara dan masyarakat sipil khususnya melahirkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru membawa dan mengandung nasaf demokrasi seperti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum secara langsung, Undang-Undang tentang sistem kepartaian yang multi partai, Undang-Undang tentang otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik yang responsif dan berkeadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang menjamin demokrasi.

Tidak hanya melakukan reformasi hukum seperti di atas, negara dan masyarakat sipil melakukan upaya reformasi struktur politik dan pemerintahan ditandai dengan terbentuknya sistem *check and balance* antara legislatif dan eksekutif yang beraskan nilai-nilai persamaan, terbentuknya sejumlah *auxsealirye state* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hukum dan HAM, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, dan puluhan komisi lain penjaga dan penegak demokrasi. Reformasi struktur ini menjamin realisasinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan hasil dari reformasi hukum. Negara dan masyarakat sipil berkeyakinan reformasi hukum tidak berdampak baik tanpa diikuti reformasi struktur politik dan pemerintahan.

Reformasi hukum dan struktur politik serta pemerintahan seperti dijelaskan di atas perlu diperkuat reformasi budaya. Kekuasaan orde baru selama 32 tahun secara nyata telah memperkuat budaya, cara pandang, sikap, dan perilaku menyimpang elemen bangsa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selama 32 tahun Soeharto berkuasa tentunya meninggalkan budaya-budaya anti demokrasi, anti perubahan, dan anti masyarakat sipil. Karena itu, perlu dilakukan reformasi budaya sebagai upaya merubah cara pandang, sikap, dan perilaku elemen bangsa yang tidak searah dengan nilai-nilai

demokrasi. Akhir-akhir ini negara dan masyarakat sipil gencar melakukan reformasi budaya anti demokrasi seperti menerapkan kurikulum anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, pelatihan anti korupsi, pelatihan penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemerintah, pelatihan advokasi dan pendampingan bagi aktivis masyarakat sipil, seminar, lokakarya, dan workshop penguatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan.

Salah satu paradigma baru pemerintahan yang dikehendaki dalam demokrasi adalah paradigma *good governance*. Paradigma ini menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai kesuksesan demokrasi dalam pemerintahan. Masyarakat sipil pro demokrasi memperjuangkan paradigma ini untuk dimiliki semua level pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Masyarakat sipil berjuang dan mendorong semua struktur pemerintah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Menurut Sedarmayanti pentingnya penerapan *good governance* di beberapa negara sudah mulai meluas ± tahun 1980, dan di Indonesia *good governance* mulai dikenal secara lebih dalam ± tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik dilingkungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk di lingkungan akademisi. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Prinsip-Prinsip *good governance* terdiri dari penegakkan hukum, transparansi, partisipatif, responsif, akuntabilitas, dan *visioner*. Namun hingga terakhir ini, pemerintah dinilai sulit menerima dan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan ini tampak dari maraknya tindakan korupsi diberbagai level pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang mahal, minimnya keterbukaan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat dalam penentuan dan pengawasan kebijakan, dan penegakkan hukum tidak berpihak kepada kebenaran.

Persoalan ini tidak sulit dijumpai diberbagai pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintah Kota Malang, misalnya, meskipun tergolong sebagai daerah pendidikan namun kebijakan pemerintah Kota Malang terhadap sektor pendidikan masih sangat minim. Hasil penelitian penulis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 dinilai tidak berpihak kepada sektor pendidikan. Total belanja untuk sektor pendidikan dikatakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang 20% untuk sektor pendidikan namun dari total anggaran tersebut lebih banyak terserap pada urusan administratif seperti belanja alat tulis kantor (ATK) perkantoran sehingga 20% tersebut tidak dirasakan masyarakat manfaatnya secara nyata. Selain itu, contoh nyata ketidak berpihakan APBD Kota Malang terhadap masyarakat nampak dari anggaran belanja langsung DPRD Kota Malang Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp 45 Miliar untuk 45 lima orang anggota DPRD Kota Malang. Penulis menemukan dari Rp 45 miliar tersebut dikucurkan untuk belanja air minum rapat paripurna mencapai Rp. 1 meliar.

Hasil penelitian yang dilakukan Sopanah dan Wahyudi pada tahun 2009 di Kota Malang, menunjukkan keterlibatan rakyat dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran masih sangat kecil (5%) sehingga sangat memungkinkan terjadinya distorsi pada saat penyusunan anggaran. Temuan yang

sama dari hasil penelitian mengenai distorsi Penyusunan APBD adalah: 1) Proses penyusunan APBD Tahun 2009 Kota Malang banyak mengalami ketidaksesuaian dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak partisipatif, dan sulit diakses oleh publik. 2) Terjadinya distorsi dalam proses penyusunan APBD Kota Malang Tahun 2005.

Hasil penelitian penulis pada tahun 2013 menunjukkan keengganan Pemerintah Kota Malang untuk mengajak masyarakat Kota Malang terlibat dalam menentukan program pembangunan dan anggaran daerah. Bagi pemerintah Kota Malang, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musrenbang harus dibatasi dengan tujuan kegiatan dapat berjalan tanpa dinamika (konflik). Karena itu, cukup diwakili oleh kelompok-kelompok tertentu yang dianggap memiliki kesamaan kepentingan misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap bagian dari ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Penulis juga menemukan berbagai persoalan lain di pemerintahan Kota Malang yaitu Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai hasil dari kegiatan musrenbang tidak sepenuhnya diperhatikan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Persoalan ini muncul karena : (1) Terbangunnya komunikasi politik saling menguntungkan antara Kepala Daerah dan DPRD, (2) Kepala Daerah mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan masyarakat, (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dapat bekerja *profesional* sesuai peraturan hukum yang berlaku, karena kuatnya pengaruh kepentingan politik kepala daerah dan DPRD, (4) Pimpinan SKPD-SKPD mengedepankan komunikasi politik dengan DPRD untuk mendapatkan bagian anggaran, bukan

mengedepankan kinerja dan *profesionalitas*, (5) Pimpinan SKPD-SKPD selaku pengguna anggaran mengedepankan komunikasi *kolusif* dengan pihak pelaksana anggaran (pihak swasta).

Berdasarkan data yang dihimpun penulis, Pemerintah Kota Malang terdapat banyak kasus korupsi yang merugikan keuangan negara diantaranya sebagai berikut:

Jenis Kasus	Tahun	Keregian Negara	Oknum dan Instansi
Korupsi APBD TA 2004 Pos Anggaran DPRD Kota Malang	2004	Rp 8,4 Miliar	10 anggota DPRD periode 2004-2009. Mereka adalah Abdul Manab, Yulia, H A Syafii, Andi La Syabandar, Gagah Suwasawan, Hardi Prayitno, Rahmat Setyoso, Agus Malaysiyanto, Syaid Yasin, dan Yaqub Koecio.
Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)	2010	Rp 120 juta lebih	Bambang Setiadin, dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM)
Korupsi dana BBM Dishub	2010	Rp 700 juta	Dishub dan SPBU

Sumber: Dihimpun dan diolah dari berbagai media cetak dan online.

Masyarakat sipil Kota Malang seperti Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) menyadari persoalan tersebut disebabkan keengganan pemerintah Kota Malang menjadikan paradigma *good governance* sebagai dasar dan acuan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, masyarakat sipil kota malang menghadapi tantangan berat untuk mewujudkan *good governance* dalam lingkungan pemerintahan kota malang. Pada penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana model gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan *good governance* pemerintahan Kota Malang di tengah situasi dan kondisi pemerintahan seperti penulis sampaikan di atas.

Berdasarkan pengamatan dan observasi awal penulis menunjukkan adanya upaya-upaya serius masyarakat sipil kota malang seperti MCW dan FMPP untuk mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan kota malang seperti melakukan seminar, publikasi, workshop, pelatihan, dan advokasi *good governance* bagi pemerintah dan masyarakat kota malang. Pada penelitian ini penulis ingin menelusuri lebih jauh bagaimana upaya-upaya itu dilakukan, dampaknya terhadap paradigma masyarakat dan pemerintah kota malang, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini tidak hanya menggali persoalan-persoalan yang disampaikan tersebut. Besar kemungkinan penelitian ini akan mengarah pada pembahasan-pembahasan lain yang terkait dengan gerakan masyarakat sipil mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas dapat diuraikan rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Bagaimana model gerakan masyarakat sipil mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang?
2. Bagaimana bentuk upaya-upaya masyarakat sipil Kota Malang mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami model gerakan masyarakat sipil mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang.



2. bentuk upaya-upaya masyarakat sipil Kota Malang mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang.
3. Menemukan model tepat gerakan masyarakat sipil mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang.

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Teori Hegemoni Antonio Gramsci**

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Gramsci sebagai acuan untuk memahami gerakan sosial masyarakat sipil mewujudkan *good governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang. Teori hegemoni Gramsci menjelaskan upaya negara dan masyarakat sipil untuk saling mempengaruhi agar gagasan dan ideologi dapat diterima oleh semua pihak. Pada konteks ini, teori hegemoni digunakan untuk memahami bagaimana upaya masyarakat sipil mempengaruhi pemerintah untuk menjadikan *good governance* sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang. Berikut pikiran-pikiran Antonio Gramsci yang relevan dengan penelitian ini.

##### **1. Kritikan Gramsci terhadap Marx dan Marxisme lain**

Antonio Gramsci adalah pemikir politik Marxisme. Marxisme adalah paham dan ajaran politik Marx. Dengan demikian, Gramsci adalah pengikut ajaran Marx. Ia menjadikan pemikiran Marx sebagai landasan pengembangan pemikiran, landasan dalam berpolitik praktis, dan menjadikan ajaran Marx sebagai inspirasi dalam melahirkan ide-ide baru. Meskipun Gramsci menjadikan ajaran politik Marx seperti tersebut, bukan dalam arti Gramsci mengikuti sepenuhnya ajaran-ajaran politik Marx. Sebaliknya, Gramsci banyak mengkritisi proposisi-proposisi teori Marx. Pada bagian ini, penting untuk menjelaskan kritikan Gramsci terhadap pemikiran Marx sebagai upaya pembedaan dan kesamaan Gramsci dengan Marx dan pemikiran politik Marxisme lainnya.

Berdasarkan uraian Robert Bocook (2007) dalam bukunya yang berjudul ‘Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni’, dan uraian Roger Simon (1999) dalam bukunya yang berjudul ‘Gagasan-Gagasan Politik Gramsci’, terdapat lima bagian kritikan Gramsci terhadap pemikiran Marx, yaitu: Ekonominisme dan Determinisme Ekonomi, Tendensi Positivistik, Reduksionisme Pendidikan, dan Definisi Masyarakat Sipil.

*Pertama*, “Ekonominisme Marx (Ajaran Ortodoks, Determinisme Mekanis). Konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi terhadap suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Konsep ekonomi menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara. Budaya, politik, dan adat merupakan bagian yang tidak penting dalam konsep ekonomi. Akibatnya, sosialisme dan golongan ortodoks ini direduksi menjadi hanya kelas ekonomi, sehingga gerakan itu hanya menjadi gerakan buruh, dan mengabaikan kemungkinan gerakan lain seperti *Civil right movement*, *women movement*, gerakan masyarakat adat ataupun gerakan lingkungan serta gerakan sosial lain. Analisis Gramsci membantu membuka dan mengkaitkan gerakan buruh sebagai bagian dari gerakan *civil society* dan sebaliknya. Dalam kaitan inilah sesungguhnya Gramsci membuka jalan selebar-lebarnya tentang gerakan *civil society* dari gerakan yang tadinya hanya terfokus pada gerakan buruh”<sup>1</sup>. Pendekatan ekonomisme ini tercermin dalam penggunaan yang luas metaphor “struktur dasar dan struktur atas” (*base and super structure*) yang diambil dalam pengantar Marx yang terkenal dalam buku *Contribution to A Critique of Politcal Economi* (1859). Perkembangan yang berarti signifikan dipahami sebagai perkembangan yang berlangsung dalam struktur dasar ekonomi tersebut, sementara perjuangan politik hanya dianggap sebagai bagian dari struktur atas yang

---

<sup>1</sup>Mansour Fakhri dalam Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta : Penerbit INSIST dengan Pustaka Pelajar, 1999) hal. xv

dibangun di atas struktur dasar”<sup>2</sup>. Determinisme mekanis ini sangat berpengaruh beberapa partai sosialis seperti Partai Sosialis Demokrat Jerman.

*Kedua*, “Tendensi positivism dalam pemikiran kalangan Marxis adalah pandangan tentang perubahan formasi sosial. Salah satu tafsirnya adalah bahwa masyarakat berkembang dan berubah secara linear dari formasi sosial dan akumulasi primitif ke feodal, lantas Kapitalistik, dan akhirnya mekanime eksploitatif yang mencapai taraf menekan hingga memunculkan revolusi kaum buruh proletar, kemudian akhirnya terwujudlah masyarakat dengan formasi sosialistik. Dalam tafsiran yang stukruralistik dan positivistik itu, faktor manusia, kesadaran kritis, ideologi dan keyakinan diyakini banyak ditentukan oleh basis ekonomi yang objektif dan, oleh karenanya tidak dianggap fundamental. Dalam realitas politik yang dianalisis Gramsci menunjukkan bahwa formasi sosial kapitalistik yang eksploitatif dan penindasan politik rezim fasisme Mussolini ternyata tidak secara otomatis melahirkan revolusi sosial, malah muncul gejala menguatnya “*de-proletarisasi*”, dimana para buruh rela dan *concern* menerima penderitaan, dan bahkan mendukung keberadaan rezim Mussolini”.

*Ketiga*, “Paham reproduksi dalam pendidikan menganggap bahwa pendidikan sulit diharapkan untuk memerankan perubahan, melainkan mereka yang justru memproduksi sistem yang ada atau hukum yang berlaku. Sebaliknya, sistem-sistem Gramsci menyumbangkan perubahan yang besar dalam pemikiran “*popular education*” dan *participatory training*”, yang menekankan pembangkitan kesadaran kritis tersebut. Pemikiran Gramsci sangat berpengaruh terhadap munculnya pendidikan kritis dan mendorong munculnya aliran produksi dalam pendidikan dan pelatihan, yakni setiap upaya pendidikan bagi mereka ini selalu ada peluang untuk senantiasa mengembalikan fungsinya sebagai proses independen untuk transformasi sosial. Hal ini berarti proses

---

<sup>2</sup> Roge Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, (Yogyakarta : Penerbit INSIST dengan Pustaka Pelajar, 1999) hal. 20.

pendidikan harus memberi ruang untuk menyingkirkan segenap tabu dan menantang secara kritis hegemoni dominan.

*Keempat*, “Definisi Marx dan Engel tentang masyarakat sipil dan masyarakat politik dianggap terlalu sempit karena hanya menunjukkan hubungan pada konteks ekonomi dan produksi. Menurut Gramsci hubungan masyarakat sipil dan masyarakat politik sangak kompleks. Dalam ruang lingkup masyarakat sipil dan masyarakat politik terdapat hubungan ekonomi dan hubungan politik. Kedua hubungan tersebut berlangsung pada kedua bentuk masyarakat tersebut.

## 2. Sumbangsih Pemikiran Gramsci

Terdapat beberapa sumbangsih pemikiran Antonio Gramsci yang dapat dijadikan sebagai acuan analisis pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

### **a. Pendidikan Kritis**

Melalui pendidikan kritis, lahir kesadaran politik kritis terhadap hegemoni dominan dan sistem yang tidak adil merupakan dasar penting dalam *civil society* yang merupakan perkumpulan sosial politik, masyarakat adat, pesantren, ataupun LSM dimana masing-masing anggotanya memiliki kesadaran kritis sebagai “intelektual organik”, dalam suatu aksi politik untuk menciptakan sejarah mereka sendiri. Lebih dari itu, *civil society* juga merupakan kontra diskursus warga negara terhadap diskursus dominan seperti globalisasi, developmentalisme, yang tidak demokratis dan tidak berkeadilan sosial<sup>3</sup>.

Kegagalan Partai Sosialis Italia disebabkan sikap pengabaian dalam mengorganisir organisasi sosial atau pengabaian pendidikan kritis kepada buruh. Pemimpin Italia tidak menduga bahwa revolusi akan muncul dari bergesernya perimbangan-perimbangan inisiatif-inisiatif politik. Sebaliknya mereka yakin bahwa ketika kontradiksi-kontradiksi kapitalisme berkembang, gerakan massa akan muncul

---

<sup>3</sup> Mansour Fakih, Op. Cit., hal. xix

dengan sendirinya dan mengantar partai sosialis ke tempat kekuasaan. Jadi, para Pemimpin Sosialis Italia tidak melakukan upaya serius untuk membangun aliansi yang luas dikalangan kelas pekerja yang terdiri dari berbagai kekuatan sosial baru seperti para petani dan kaum borjuis kota, melainkan mereka membiarkan kekuatan-kekuatan ini digerakkan oleh Partai Fasis Musolini, dan meninggalkan gerakan buruh begitu saja sehingga menjadi kekuatan bagi kemenangan penuh fasisme”<sup>4</sup>.

Hegemoni hanya dapat diraih melalui pendidikan kritis yakni mengubah kesadaran, pola pikir dan pemahaman masyarakat, “konsep mereka tentang dunia, serta norma perilaku mereka. Pendidikan kritis bertujuan melakukan Revolusi Intelektual dan Moral. Dengan melakukan revolusi intelektual dan moral diharapkan mampu menghapus pemikiran awam, yang cenderung membuat mereka menerima ketidakadilan dan penindasan sebagai hal yang alamiah dan tidak dapat diubah. Pemikiran awam dirubah melalui proses interaksi, mengembangkan inti positifnya menjadi pemikiran awam sosialis yang baru dan runtut.

#### **b. Hegemoni Politik**

Gramsci mengakui bahwa konsep hegemoni lahir dari pemikiran Lenin tentang “kelas pekerja harus bergerak melampaui fase korporasi ini dan, bersama-sama dengan kaum petani, harus bertindak sebagai kekuatan utama (hegemonik) dalam ruangan demokratis menentang bangsa Tsar (Negara Tsar adalah negara otokrasi). Lenin dalam teori dan praktik mengembangkan konsep kepemimpinan yang dipegang oleh kelas pekerja yang berasal dari gabungan dari berbagai kekuatan sosial yang luas”<sup>5</sup>. Dasar-dasar konsep hegemoni diletakkan oleh Lenin dengan menyempurnakan upaya yang telah dikerjakan oleh para pendiri gerakan buruh Rusia. Kelas pekerja harus mengembangkan kekuatan nasional, berjuang untuk membebaskan semua kelas atau kelompok yang

---

<sup>4</sup> Roger Simon, Op. Cit., hal. 31.

<sup>5</sup> Ibid., hal. 20.

tertindas. Dalam aliansinya dengan para petani, kelas pekerja Rusia harus bertindak sebagai kekuatan utama (hegemonik) dalam revolusi demokratis borjuis untuk menggulingkan kekuasaan bangsa Tsar. Dengan cara ini, kelas pekerja, yang pada masa itu masih merupakan kelompok minoritas, mampu memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk.

Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi, suatu strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungannya dari mayoritas. Pengertian Lenin tersebut diperluas oleh Gramsci, hegemoni bukan merupakan strategi untuk revolusi. Pengertian hegemoni menurut Lenin lebih pada kesamaan istilah dengan konsep dominasi. “Gramsci membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual”: “Suatu kelompok sosial bisa, bahkan harus menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka mereka harus tetap memimpin”<sup>6</sup>.

Ada dua syarat agar kelas pekerja menjadi kelas hegemonik, yaitu memperhatikan kepentingan kelas dan menemukan cara mempertemukan kelompok lain untuk menyetujui kepentingan mereka sendiri. Untuk mempertemukan kedua pihak, buruh-pemodal, merupakan pekerjaan yang sulit untuk mendapatkan kesepakatan bersama, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda.

Untuk berada pada posisi hegemonik, Gramsci mengajukan konsep tentang nasional-kerakyatan: “Suatu kelas tidak bisa meraih kepemimpinan nasional, dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya membatasi pada kepentingan mereka sendiri, mereka

---

<sup>6</sup> Antonio Gramsci, SPN57-68, dalam Roge Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, (Yogyakarta : Penerbit INSIST dengan Pustaka Pelajar, 1999) hal. 22.

harus memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yakni yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi. Jadi, hegemoni mempunyai dimensi nasional-kerakyatan, disamping dimensi kelas (karena menuju nasional kerakyatan berangkat dari gerakan-gerakan berbagai kelas). Hegemoni memerlukan penyatuan berbagai kekuatan sosial yang berbeda ke dalam suatu aliansi yang luas yang mengungkapkan kehendak kolektif semua rakyat, sehingga masing-masing kekuatan ini bisa mempertahankan otonominya sendiri dan memberikan sumbangan dalam gerak maju menuju sosialisme.

Gramsci melakukan pembedaan tegas antara strategi yang diterapkan kapitalis dengan strategi yang dilakukan kelas pekerja. Strategi kaum borjuis mempunyai sifat khusus yang dinamakan revolusi pasif. Revolusi pasif berasal dari gerakan elit yang merupakan agen negara seperti aparat keamanan. Revolusi pasif muncul karena terjadi perubahan struktur negara. Revolusi ini tentu menguntungkan kelas borjuis, oleh karena itu gerakan sosialis pekerja harus anti revolusi pasif.

Gramsci menjelaskan revolusi pasif dengan melakukan pembedaan antara Revolusi Perancis dengan Revolusi Risorgimento Italia. Dalam revolusi Perancis, Jacobin dapat memobilisir rakyat untuk melakukan perjuangan revolusioner dengan cara mendukung tuntutan kaum tani dan pembangun aliansi dengan mereka. Sebaliknya penyatuan Italia dan naiknya kaum Borjuis Italia ketampuk kekuasaan dalam *Risorgimento* dilakukan Cavour dan Partai Moderat dengan cara yang sangat berbeda, yaitu tidak mengikut sertakan rakyat; sarana utama mereka adalah negara Piedmont dengan Tentara, Kerajaan, dan Birokrasinya. Partai Aksi merupakan oposisi dari Partai Moderat. Menurut Gramsci, Partai Aksi kalah disebabkan karena mereka gagal membangun agenda yang mencerminkan tuntutan utama masyarakat umum, dan terutama tuntutan petani. Selain sukses meraih kekuasaan, Partai Moderat juga sukses menanamkan

nilai-nilai ideologis kepada individu-individu Partai Aksi dengan ditandai banyaknya menyeberang ke kelompok moderat. Karena model revolusi yang demikian, oleh Gramsci Revolusi Risegimento Italia dinamakan Revolusi Pasif. Revolusi pasif tidak berkualitas perjuangan nasional kerakyatan. Karena itu, Gramsci menyatakan, “Para pemimpin Risorgimento Italia bermaksud menciptakan negara modern di Italia dan pada kenyataannya melahirkan anak haram”.

Teori Hegemoni Gramsci dibangun atas pengakuan bahwa perjuangan-perjuangan demokrasi rakyat, dan lembaga-lembaga parlementer yang telah mereka bentuk tidak perlu mempunyai karakter kelas. Sebaliknya, lembaga-lembaga menjadi jalur bagi perjuangan politik antara dua kelas utama-kelas pekerja dan kelas kapitalis. Untuk bergerak maju menuju sosialisme, gerakan buruh harus menemukan cara untuk mempertautkan perjuangan-perjuangan demokrasi rakyat ini dengan tujuan-tujuan sosialisnya, membangun aliansi yang memungkinkannya untuk meraih kedudukan kepemimpinan nasional (hegemoni)<sup>7</sup>.

Untuk mendapatkan hegemoni dibutuhkan kerja keras dari kelompok-kelompok sosial. Usaha-usaha untuk mendapatkan hegemoni harus diikuti dengan usaha-usaha untuk mempertahankan dan melestarikan sistem yang ada dengan cara menata dan memperkuat kembali lembaga-lembaga negara. Berikut Roger Simon menguraikan pemikiran Gramsci tentang langkah-langkah dan alasan mempertahankan sistem: “Usaha-usaha itu harus mencakup perjuangan untuk menciptakan keseimbangan baru dari berbagai kekuatan politik, dan menuntut pembentukan kembali lembaga-lembaga negara seperti halnya pembentukan ideologi-ideologi baru, dan jika kekuatan oposisi tidak cukup kuat untuk menggeser keseimbangan berbagai kekuatan dalam perjuangan mereka, maka

---

<sup>7</sup> Roger Simin, Op.Cit., hal. 11.



kekuatan konservatif akan berhasil membangun sistem aliansi baru yang akan memperkokoh kembali hegemoni mereka”.

### **c. Masyarakat Sipil (*Civil Society*)**

Konsep Gramsci tentang *civil society*. Gramsci membedakan antara lembaga-lembaga publik negara dengan masyarakat sipil yang terdiri dari semua organisasi swasta yang bersifat sukarela seperti serikat dagang, partai politik, gereja, organisasi masyarakat dan organisasi amal. “Hegemoni dari kelas dominan dijalankan dalam masyarakat sipil dengan mengajak kelas-kelas yang berada di bawah untuk menerima nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang telah diambil oleh kelas yang dominan itu sendiri, dan dengan membangun jaringan kerjasama yang didasarkan atas nilai –nilai tersebut. Langkah menuju sosialisme dilakukan dengan membangun hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) oleh geraka buruh dan ini memerlukan proses reformasi moral dan ideologi yang panjang<sup>8</sup>.

Gramsci mendefinisikan masyarakat sipil sebagai bentuk hubungan antar organisasi sosial seperti partai politik, gereja, organisasi masyarakat, sarekat dagang, masyarakat adat, sarekat buruh. Negara tidak termasuk pada hubungan tersebut, karena memiliki kekuatan kekerasan (koersif). Masyarakat sipil adalah suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi-kerakyatan. Masyarakat sipil adalah wadah disitu kelompok sosial dominan mengatur konsensus dan hegemoni. Masyarakat sipil juga adalah suatu wadah dimana kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (*subordinate*)

---

<sup>8</sup> Ibid., hal. 13.

dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternatif (*counter-hegemony*)<sup>9</sup>.

Selain merebut kekuasaan politik, masyarakat sipil juga harus meraih kepemimpinan dalam produksi. Hal ini semata-mata menghindari kekuatan kelompok borjuis dalam menguasai kepemimpinan produksi. Jika kelompok borjuis, maka dengan sendirinya akan menguasai kepemimpinan politik. Oleh karena itu, Gramsci melarang membedakan kepemimpinan produksi dan kepemimpinan politik. Dua kepemimpinan tersebut harus disatu padukan dalam melakukan gerakan sosial. Dengan dua kepemimpinan itu pula, kelompok sosial mampu melakukan hegemonik dengan efektif.

Gramsci menjelaskan bahwa masyarakat sipil lebih mudah menguasai negara pada negara yang memosisikan masyarakat sipil sebagai mitra. Berikut penjelasannya pada salah satu paragraph *Prison Notebook* yang dikutip Rogen Simon: “Di timur negara adalah segalanya, masyarakat sipil adalah primordial dan lemah; di barat terdapat hubungan yang serasi antara negara dan masyarakat sipil, dan ketika negara mengalami goncangan maka struktur masyarakat sipil segera menggantikannya<sup>10</sup>”.

Pemahaman Gramsci, negara bukan alat kelas penguasa untuk melakukan represi atas kelas yang lain seperti yang didefinisikan oleh Lenin. Gramsci mendefinisikan negara sebagai proses pembentukan kekuasaan yang terus menerus berlangsung, karena di dalam negara terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang membuat sistem tidak stabil. Jadi, meskipun kelas hegemoni itu berkuasa dalam negara, mereka tidak dapat menjadikan negara semata-mata hanya untuk menerapkan kepentingan mereka sendiri terhadap kelas-kelas lain.

Gramsci mendefinisikan masyarakat sipil dan masyarakat politik dapat diikuti apa yang dikutip oleh Roger Simon pada paragraph *Prison Notebook* sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ibid., hal. 28.

<sup>10</sup> Gramsci, Op.Cit.,1999

“Apa yang bisa kita lakukan, untuk saat ini, adalah menyatukan dua tingkat suprastruktur utama: yang pertama bisa disebut masyarakat sipil, yaitu bagian dari kelompok yang biasanya disebut “*private*”, dan kedua “masyarakat politik atau negara. Keduanya disatu sisi, memiliki fungsi-fungsi hegemoni yang dilakukan oleh kelompok dominan dalam masyarakat, dan disisi lain, juga mempunyai fungsi-fungsi dominasi langsung yang dilakukan oleh negara dan pemerintahan hukum.

Masih mengikuti kutipan Roger Simon tentang masyarakat sipil menurut Gramsci: “dan dalam suratnya tanggal 07 September 1931 Gramsci menunjukkan bahwa masyarakat sipil itu mencakup apa yang disebut organisasi-organisasi “swasta” (*private*) seperti gereja, serikat dagang, sekolah dan sebagainya, dan ia menambahkan ‘jelas dalam masyarakat sipil lah kaum intelektual itu menjalankan tugasnya secara khusus....’”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan masyarakat sipil menurut Gramsci adalah kumpulan organisasi-organisasi sosial, politik, dan ekonomi dalam melakukan hubungan untuk mencapai tujuan dan orientasi masing-masing. Di dalam masyarakat sipil terjadi proses penyebaran dan pengaruh ideologi dari kelas yang satu kepada kelas yang lain. Dengan demikian, masyarakat sipil merupakan ruang pertentangan kelas termasuk kelas borjuis dengan kelas pekerja. “Semua organisasi yang membentuk masyarakat sipil ini merupakan hasil dari jaringan kerja dari praktik-praktik dan hubungan-hubungan sosial yang bersifat kompleks, termasuk pertentangan antara dua kelas utama, pemodal dan pekerja (buruh)<sup>11</sup>.

Gramsci membedakan masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Definisi masyarakat sipil adalah seperti yang disampaikan di atas. Masyarakat politik adalah ditunjukkan untuk hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing termasuk fungsi koersif. Seperti yang dikutip Roger Simon

---

<sup>11</sup> Ibid., hal. 102.

“Gramsci menggunakan istilah masyarakat politik bagi hubungan-hubungan koersif yang terwujud dalam berbagai lembaga negara-angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum dan penjara, bersama-sama dengan semua departemen administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan sosial, dan sebagainya, yang tergantung upaya akhir dari efektifitas monopoli negara dalam melakukan tindakan koersif<sup>12</sup>. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan tersebut, Roger Simon menyimpulkan, “bahwa istilah masyarakat politik bukan lah pengganti istilah “negara”, namun istilah itu hanya menunjuk pada hubungan-hubungan koersif yang terdapat pada aparat negara”<sup>13</sup>.

Berdasarkan definisi Gramsci tentang masyarakat sipil dan masyarakat politik seperti di atas, Roger Simon menekankan “kita jangan sampai memahami perbedaan masyarakat sipil dan negara seolah-olah keduanya terpisah secara fisik dan menjadi wilayah yang tersendiri dengan batas-batas yang tegas. Pada dasarnya keduanya terbentuk dari berbagai hubungan sosial yang-dalam kasus negara-yang bersifat koersif menjelma kedalam berbagai organisasi. Gramsci mengatakan lembaga pendidikan termasuk universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil. Lembaga pendidikan merupakan tempat bagi warga masyarakat untuk menimba ilmu-guru dan siswa berinteraksi dalam belajar mengajar. Mengingat lembaga pendidikan dan guru adalah juga bagian dari lembaga negara. Lembaga pendidikan dan guru berada di dalam struktur negara. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, meskipun terdapat perbedaan, masyarakat sipil dan masyarakat politik tidak bisa dipahami bagian terpisah yang tidak memiliki hubungan.

Pada kajian selanjutnya, Gramsci tampak tidak membedakan secara khusus antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Hal ini tampak pada definisi negara yang diuraikan oleh Gramsci berikut ini: “negara merupakan suatu kompleks dari aktifitas

---

<sup>12</sup> Roger Simon, Op. Cit., hal104

<sup>13</sup> Ibid., 105

praktis dan teoritis di mana kelas penguasa tidak hanya mempertahankan dominasinya namun memperoleh persetujuan dari kelompok lain yang berada di bawah kekuasaannya”. Definisi tersebut memperkuat dan mempertegas hubungan masyarakat sipil dan masyarakat politik (negara) sama pentingnya dalam posisi hegemoni dan dihegemoni. Meskipun negara memiliki kekuatan koersif (dominasi) namun tetap membutuhkan legitimasi masyarakat sipil yang ditunjukkan melalui persetujuan terhadap tindakan negara. Karena negara memiliki kekuatan koersif, maka dengan sangat mudah untuk menghegemoni masyarakat sipil. Ditambah dengan beberapa organisasi di dalam masyarakat sipil yang merupakan penjelmaan masyarakat politik (negara) seperti lembaga pendidikan dan ikatan profesi aparatus yang secara struktural di bawah kekuasaan negara. Kondisi tersebut disebut oleh Roger Simon sebagai hegemoni negara yang dilindungi oleh tameng koersif. Negara seperti ini disebut oleh Gramsci sebagai Negara Integral.

Robert Bacoock membedakan negara integral yang dimaksudkan Gramsci dengan negara totalitarianisme, “Konsep negara integral dapat dibedakan dengan konsep totalitarianisme. Tidak dapat unsur kesepakatan sukarela dalam totalitarianisme seperti yang terdapat dalam suatu negara integral, yang di dalamnya kesepakatan tentang tujuan-tujuan dasar didasarkan pada seperangkat gagasan dan nilai, suatu falsafah bersama yang demikian oleh sebageian besar orang berdasarkan persetujuan yang aktif dan diberikan secara bebas. Persetujuan tidak dimanupulasi dan tidak dihasilkan oleh ketakutan terhadap kekuatan koersif, negara pun tidak berfungsi seperti yang terjadi pada negara totalitarianism. Suatu neagar integral tidak akan memenjarakan warga masyarakatnya berdasarkan kepentingan politik negara”<sup>14</sup>. Karena itu, negara integral tepat disebut sebagai negara sosial kerakyatan atau nasional kerakyatan, dan atau demokrasi kerakyatan.

---

<sup>14</sup> Robert Bocoock, Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni, (Bandung: Penerbit Jalasutra, 2007) hal. 26.

Hubungan organisasi-organisasi di dalam masyarakat sipil dikatakan oleh Gramsci adalah hubungan kekuasaan. Relasi antara organisasi-organisasi di dalam masyarakat sipil terdapat unsur kekuasaan. Kelas pemodal dan buruh saling mempengaruhi (konflik) untuk mendapatkan kekuasaan sebagai alat hegemoni. Masyarakat politik melalui kekuatan koersif dapat menjelma pada berbagai hubungan organisasi-organisasi pada masyarakat sipil. Kelas pekerja harus menghadapi dua bentuk penindasan, yakni penindasan kelas borjuis yang bagian dari masyarakat sipil, dan penindasan negara yang merupakan masyarakat politik. Dua penindasan tersebut berbeda bentuk sesuai dengan hubungan masing-masing. Bentuk penindasan kelas borjuis terhadap kelas buruh adalah penindasan eksploitasi. Sedangkan penindasan negara terhadap kelas pekerja adalah penindasan melalui seperangkat aturan hukum, prosedur birokrasi, dan menjadikan organisasi masyarakat sipil sebagai alat penindasan. Aturan hukum dibuat agar kelas pekerja dibebankan pajak yang tinggi, tidak diberikan kebebasan dalam bertindak, tidak mendapatkan keadilan, persamaan, dan pemerataan. Prosedur birokrasi dibuat agar warga masyarakat sulit mendapatkan akses terhadap barang-barang publik. Organisasi masyarakat sipil dapat dijadikan sebagai alat penindasan dengan cara, membentuk organisasi khusus sebagai alat kontrol politik untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan.

Dimana ada kekuasaan, disitu ada perlawanan. Ungkapan ini tepat untuk menggambarkan kekuasaan negara, yang mendapatkan perlawanan dari masyarakat sipil termasuk perlawanan kelas pekerja terhadap negara. Menurut Gramsci, kelas pekerja dalam melawan negara harus memiliki strategi sesuai dengan kondisi masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang masih primodial dan tradisional, negara dapat dilawan dengan perlawanan frontal. Strategi ini ditemukan oleh Gramsci dari hasil kajiannya tentang revolusi Rusia pada tahun 1917. Berikut catatan Gramsci yang dikutip Roger Simon:

“Pada tahun 1917 di Rusia, di mana masyarakat sipil masih primodial dan belum maju, perlawanan frontal terhadap negara atau disebut perang gerakan bisa berhasil”<sup>15</sup>.

Melawan negara pada masyarakat kapitalis yang maju dibutuhkan strategi yang berbeda dari strategi di atas. Gramsci menyatakan: “Perang Posisi, adalah perang yang dilakukan untuk melawan negara pada masyarakat kapitalis. Kelas pekerja harus membongkar sistem pertahanan dan yang mendukung hegemoni kaum borjuis dengan membangun aliansi dengan semua gerakan sosial yang sedang berusaha mengubah relasi-relasi dalam masyarakat sipil. Kekuasaan hegemoni yang dijalankan oleh kaum borjuis melalui organisasi dalam masyarakat sipil harus terus diperlemah dengan kekuatan balik dari gerakan-gerakan sosial yang berasal dari aktivis anggota gerakan tersebut yang bersatu di bawah kelas pekerja.

Untuk menuju perubahan revolusioner dari kapitalisme menuju sosialisme kerakyatan atau nasional kerakyatan, dan atau demokrasi kerakyatan, dibutuhkan perubahan relasi sosial masyarakat sipil sebagai dasar perubahan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil harus berada dibawah kepemimpinan kelas pekerja. Dengan demikian kelas pekerja mampu melakukan hegemoni terhadap kelas borjuis kapitalis sehingga terbentuk konstitusi sosialis yang diinginkan. Karena itu, penting menjaga hubungan baik antara elit masyarakat sipil (pimpinan partai) dengan massa. Roberto Bocoock menyatakan, “Gramsci berargumen bahwa adalah penting untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara para pemimpin dan massa sebelum suatu revolusi terjadi, karena jika tidak demikian halnya, sesudah revolusi apa pun, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan bersifat kediktatoran”<sup>16</sup>.

Selanjutnya Gramsci menganalisis terbentuknya negara sosialisme menuju negara diktator dibawah sistem komunisme. Negara sosialisme terbentuk karena mampu

---

<sup>15</sup> Gramsci, Op.Cit., hal. 111.

<sup>16</sup> Robert Bocoock, Op. Cit., hal. 17.

melawan kelas borjuis dalam masyarakat sipil. Kelas pekerja melakukan pemberantasan terhadap masyarakat sipil hingga tidak terdapat dalam sebuah negara. Ketika negara tidak terdapat masyarakat sipil yang maju, maka ketergantungan terhadap negara sangat kuat. Pada tahap ini akan terbentuk negara diktator atau oleh Gramsci disebut periode *statolatry*. Periode ini dinilai sangat berbahaya sehingga perlu dilakukan revolusi dan lalu melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sipil yang kuat dan maju tetapi berprinsip nasional kerakyatan. Berikut Gramsci menguraikan: “Jenis *statolatry* tidak boleh ditinggalkan begitu saja, dan terutama tidak boleh menjadi fanatisme teoritis atau dianggap ‘abadi’. Ia harus dikritik, terutama untuk membangun dan menghasilkan bentuk baru masyarakat sipil, di mana inisiatif individu dan kelompok akan berkembang.

Roger Simon menyimpulkan, masyarakat sipil menurut Gramsci serta hubungannya dengan negara yang bersifat kompleks memberikan perspektif bagi transisi dari kapitalisme menuju bentuk sosialisme yang demokratis dan partisipatif, yang dibangun dari bawah, bukan dari atas.

#### **d. Kekuasaan**

Gramsci menyatakan bahwa kekuasaan harus dipahami sebuah hubungan. Hubungan sosial dalam masyarakat sipil juga merupakan hubungan kekuasaan sehingga kekuasaan juga bisa merata keseluruhan masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat negara yang bersifat koersif. Dengan demikian, perjuangan politik kelas pekerja (buruh) menuju sosialisme tidak boleh sebatas untuk merebut kekuasaan negara, tetapi harus diperluas pada seluruh masyarakat sipil. Hal ini perlu dilakukan karena menjadi syarat untuk melakukan kontrol atas negara<sup>17</sup>.

Gramsci membagi tiga fase (perkembangan) dalam mencapai kekuasaan hegemonik. Tiga fase yang dimaksudkan tersebut digambarkan oleh Roger Simon berikut

---

<sup>17</sup> Roger Simon, Op.Cit., hal. 30.



ini: “Fase Pertama, adalah ketika seseorang merasa perlu berdiri sejajar untuk mencapai kebutuhan ekonomi. Kesadaran tersebut melum mencapai pada tahap untuk berkumpul bersama pada suatu kelompok. Fase Kedua, ketika seseorang memiliki kesadaran untuk berkumpul bersama pada suatu kelompok dalam mencapai kebutuhan ekonomi. Kelompok tersebut ikut terlibat pada penyusunan undang-undang dan bahkan mengubahnya, namun keterlibatan tersebut hanya pada bidang ekonomi. Fase Ketiga, ketika kelompok-kelompok sosial memiliki kesadaran untuk merebut kepemimpinan politik dan kepemimpinan produksi (ekonomi). Fase pertama dan kedua disebut fase koorporasi. Pada fase yang terakhir ini (ketiga), kesadaran politik menggantikan kesadaran ekonomi atau koorporasi”<sup>18</sup>.

Roger Simon mengatakan: Berdasarkan pemikiran Gramsci tentang ketiga fase tersebut, “kita dapat mengatakan bahwa suatu kelas menjadi hegemoni jika mampu melampaui fase koorporasinya dan berhasil menyatukan kepentingan dan kekuatan sosial lain dengan kepentingannya sendiri, dan berhasil menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial utama dalam membangun bangsa. Kelas hegemonik yang berhasil membangun blok kekuatan sosial yang mampu bertahan sepanjang periode sejarah disebut Gramsci blok historis (*historic bloc*)<sup>19</sup>.

Hegemoni memiliki dimensi nasional-kerakyatan, yaitu kemampuan kelompok sosial dalam menyatukan gagasan dan kepentingan-kepentingan umum dengan kepentingan kelompok sosial tersebut. Gramsci menyatakan “Dalam konsep hegemonilah berbagai kepentingan yang bersifat nasional dipadukan”. Untuk menyatukan kepentingan menjadi kepentingan nasional dapat ditempuh dengan mengusung gagasan-gagasan yang kuat, yang diekspresikan dengan istilah-istilah seperti “patriotisme” dan “nasionalisme”. Gagasan tersebut, oleh Gramsci disebut sebagai kekuatan spiritual rakyat. Oleh karena itu,

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 34.

<sup>19</sup> Ibid., hal. 38.

kelas hegemoni adalah kelas yang berhasil menggabungkan perjuangan dan gagasan patriotik ini dengan kepentingan kelas mereka untuk meraih kepemimpinan nasional.

Kesimpulan Roger Simon menjelaskan nasional-kerakyatan Gramsci adalah:

1. Kelas pekerja hanya bisa menjadi kelas hegemoni jika mereka memegang kepemimpinan aliansi dari kelas dan strata lain. 2. Mereka harus menyatukan perjuangan demokrasi-kerakyatan dengan perjuangan mereka sendiri untuk menentang kelas kapitalis dengan tujuan membangun kehendak kolektif nasional-kerakyatan.

#### **e. Ideologi**

Bagi Gramsci, Ideologi bukan sekedar ide atau pemikiran yang terakumulasi pada satu konsep pemahaman tentang sistem kehidupan seperti sosialisme, kapitalisme, dan komunisme. Ideologi bersifat dinamis karena merupakan hasil pemikiran para intelektual dan filosof tertentu. Ideologi organik dan bersifat historis merupakan pemahaman ideologis yang utuh dan memberikan pedoman kehidupan yang bersifat abstrak dan konkrit. Ideologi organik dan bersifat historis adalah ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu: “sejauh ideologi itu secara historis diperlukan, ia mempunyai keabsahan bersifat psikologis: ideologi mengatur manusia, dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, dan sebagainya”<sup>20</sup>.

Berdasarkan penjelasan Ideologi Gramsci di atas, Roger Simon (1999:84) menyimpulkan, ideologi bukanlah sesuatu yang berada di awang-awang dan berada diluar aktifitas politik atau aktifitas praktis manusia lainnya. Sebaliknya, ideologi mempunyai eksistensi materialnya dalam berbagai aktifitas praktis tersebut. Ia memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis serta perilaku moral manusia, dan ekuivalen dengan agama dalam makna sekulernya, yaitu satunya pemahaman antara konsepsi dunia dan norma

---

<sup>20</sup> Gramsci, Op.Cit., hal. 83.

tingkah laku. Oleh karena itu, ideologi merupakan pedoman atau aturan yang mengatur manusia dalam bertindak untuk mencapai orientasi politik maupun ekonomi.

Untuk memahami hakikat ideologi atau orientasi perjuangan, maka kelas pekerja harus dilakukan reformasi intelektual dan moral. Karena dengan demikian kelas pekerja dapat memahami eksistensi perjuangan. Dan itulah sebabnya, Gramsci menjadikan reformasi moral dan intelektual menjadi elemen pokok dari hegemoni kelas pekerja.

Roger Simon mengatakan: “dengan membaca *Prison Notebooks* kita tahu bahwa Gramsci memakai berbagai istilah yang menurutnya ekuivalen dengan ideologi seperti kebudayaan, filsafat, pandangan dunia, atau konsepsi mengenai dunia, demikian pula istilah “Reformasi moral dan intelektual” ketika ia membicarakan transformasi kesadaran sebagai prasyarat perbaikan menuju sosialisme<sup>21</sup>.

Siapakah yang akan membumikan ideologi terhadap kehidupan orang lain? Gramsci mengatakan, yang membumikan ideology dan melakukan reformasi intelektual dan moral adalah intelektual organik. Konsep intelektual organik dilahirkan melalui kajian Gramsci tentang kemenangan revolusi *Risorgimento Italia*, Gramsci menunjukkan bagaimana peran pemimpin Partai Moderat Italia berhasil melaksanakan tugas tersebut untuk kaum borjuis Italia dengan cara membangun blok ideology yang mendapat perhatian luas di seluruh negara tersebut, bahkan aktivis Partai Aksi Italia sebagai oposisi sebagian besar menyeberang ke Partai Moderat. Oleh karena itu, Gramsci mengajarkan kepada kelas pekerja agar menjadi Intelektual Organik untuk mencapai posisi hegemonik.

Ideologi dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata atau aktifitas sehari-hari oleh siapapun terutama oleh masyarakat sipil dan masyarakat politik. Semua kelompok masyarakat berhak menyebarkan dan mempertahankan nilai-nilai ideologi yang dimiliki. Roger Simon mengatakan “Ideologi mempunyai eksistensi materialnya

---

<sup>21</sup> Roger Simon, Op.Cit., hal. 85.

dalam artian bahwa ia menjelma dalam praktik-praktik sosial setiap orang dan dalam lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi dimana praktik-praktik sosial tersebut berlangsung. Organisasi ini mencakup partai politik, serikat dagang dan organisasi lain yang menjadi bagian dari masyarakat sipil; aparat negara; dan organisasi-organisasi ekonomi seperti industry dan perusahaan komersial serta lembaga keuangan”<sup>22</sup>.

Ideologi yang tingkat kemanjurannya diauki adalah ideologi yang hegemonik, yakni mampu menyatukan berbagai kepentingan kedalam kepentingan ideologi yang dimiliki. Kepentingan ideologi yang diharapkan oleh Gramsci adalah kepentingan nasional-kerakyatan. Bagi Gramsci, ideologi tidak dapat dinilai sebagai kebenaran atau kesalahan, tetapi harus dinilai dari kemanjurannya dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke dalam satu wadah, dan dalam peranannya sebagai pondasi atau agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan gerakan-gerakan lain kedalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional.

Perjuangan ideologi harus menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial politik yang berkembang. Berikut Roger Simon mengutip Gramsci: “Kritik ini memungkinkan berlangsungnya proses diferensiasi dan perubahan yang dulunya menjadi unsur-unsur ideologi lama. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai masalah kedua dan tidak diperlukan, atau bahkan hanya bersifat sementara, sekarang dianggap sebagai hal pokok-yaitu menjadi inti dari kemajemukan baru yang bersifat ideologis dan teoritis. Kehendak kolektif lama larut ke dalam elemen-elemen yang bertentangan karena elemen-elemen subordinat berkembang secara sosial, dan sebagainya”<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Ibid., hal. 86.

<sup>23</sup> Ibid., hal. 89.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penyatuan kepentingan yang berbeda menjadi kepentingan nasional kerakyatan merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Namun, Gramsci mengajarkan untuk menuju kepentingan nasional kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan tuntutan rakyat yang bersifat umum. Tuntutan tersebut dapat dijadikan momentum untuk menuju kepentingan nasional kerakyatan. Pemikiran ini dilahirkan oleh Gramsci melalui kajiannya tentang kemampuan Partai Tyro Inggris merebut kekuasaan dari Partai Konservatif Inggris. Partai Tyro memanfaatkan momentum tuntutan rakyat diantaranya: tuntutan untuk hidup dibawah nilai-nilai kebebasan, mendesak pengurangan pajak, mendorong inisiatif individu, dan mengurangi peran negara. Partai Tyro bermaksud menggunakan kebencian masyarakat untuk meraih posisi hegemonic.

Pengembangan pemikiran dan memahami nilai perjuangan ideologi dibutuhkan pemahaman yang utuh dengan pemikiran yang objektif dan rasional, bukan kepentingan egoisme atau kepentingan pribadi. Pemikiran yang objektif dan rasional oleh Gramsci dinamakan *good sense*, sedangkan pemikiran yang mengedepankan pemikiran yang tidak komprehensif oleh Gramsci dinamakan pemikiran awam (*common sense*).

Dialog kritis, mau menerima dan mendengarkan pemikiran orang lain merupakan pekerjaan intelektual organik sebagai bentuk pengembangan nilai-nilai ideologi yang dimiliki. Gramsci melarang intelektual organik yang hanya mengedepankan pemikiran pribadi tanpa mendengarkan dan menerima pemikiran orang lain. "Dalam merumuskan persoalan-persoalan kritis sejarah adalah salah jika kita memahami diskusi ilmiah sebagai suatu proses peradilan di mana terdapat terdakwa dan penuntut umum yang tugasnya adalah membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan harus dihukum. Dalam diskusi ilmiah...orang yang paling istimewa adalah orang yang menerima sudut pandang lawanya dan memasukkannya kedalam bangunan pemikirannya. Memahami dan menilai

pendapat dan argumentasi lawan secara realistis...berarti menerima sudut pandang kritis yang untuk tujuan penelitian ilmiah merupakan satu-satunya bahan penting”<sup>24</sup>. Pandangannya tersebut berpengaruh pada sikap kepemimpinannya ketika memimpin Partai Komunis Italia pada tahun 1924. Rober Bacock (2007:17) menyatakan, “Gramsci sangat memperhatikan orang-orang yang memberikan persetujuan dan pemahaman yang penuh kepada berbagai kebijakan yang para pemimpin partai bermaksud menjalankannya”.

Dari uraian pemikiran-pemikiran Gramsci di atas, dapat disimpulkan, Siapapun (Kelas Pekerja, Kelas Borjuis, dan Negara) yang ingin memiliki ideologi hegemonik dapat melakukan strategi berikut ini:

1. Menerapkan pendidikan kritis pada agen-agen ideologi
2. Melakukan reformasi moral dan intelektual
3. Menjadikan kepentingan lain sebagai kepentingan nasional kerakyatan
4. Menjadikan agen ideologi sebagai intelektual organik
5. Menjadikan perjuangan ideologi sebagai bentuk dari blok historis
6. Menjadikan Ideologi yang bersifat dinamis, yakni nilai-nilai ideologi dapat menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan demokratis kerakyatan tanpa meninggalkan isi pokok dari ideologi tersebut
7. Menjadikan nilai ideologi bukan utuh hasil konstruksi pemikiran elit atau pimpinan politik
8. Memanfaatkan momentum tuntutan rakyat yang bersifat umum,
9. Memasukkan tema-tema nasional ke dalam sistem ideologi yang diperjuangkan.

---

<sup>24</sup> Ibid., hal. 96.

## B. Konsep Good Governance

Dalam buku Sedarmayanti tentang *Good Governance* dan *Good Corporate Governance* (2007)<sup>25</sup> menjelaskan secara umum governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diastikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999).

Isu *Governance* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia di dorong oleh adanya dinamika yang menuntut adanya perubahan, baik di lingkungan pemerintah dunia usaha swasta maupun masyarakat. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Lembaga internasional yang lebih awal mempopulerkan *Governance* adalah Bank Dunia, melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul *Governance and Development*.

Definisi *Governance* menurut Bank Dunia adalah “*the manner in which power is exercised in management of country’s social and economic resources for*

---

<sup>25</sup> Sedarmayanti “Good Governance (kepemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik). hal. 3-17. 2007. Penerbit Mandar Maju, Bandung.

*development*". UNDP kemudian membuat definisi yang lebih ekspansif, *governance* meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani serta interaksi antar-tiga elemen tersebut. UNDP lebih jauh menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. *Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, mau mendengar, dan mau melibatkan. Ini merupakan dasar tatanan masyarakat yang diidamkan.

Pemerintah yang baik tidak akan terjadi tanpa masyarakat madani yang kuat. Keberadaan masyarakat madani yang kuat, terdapat istilah yang menjadi populer yaitu modal sosial (*social capital*) sebagai salah satu bentuk modal yang sangat berharga selain uang, fisik, dan modal manusia. Modal sosial adalah proses antar manusia yang membentuk jaringan, norma-norma, kepercayaan sosial, serta memfasilitasi koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Modal sosial merupakan dasar untuk membangun masyarakat madani yang kuat serta dipercaya akan mempengaruhi tingkat kemajuan perekonomian dan distribusi keuntungan. Pada kenyatannya, memperkuat modal sosial kelompok miskin berarti meningkatkan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam *governance*. Modal sosial dan masyarakat yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi yang otentik dari kelompok miskin. Selain itu, keterlibatan masyarakat madani merupakan komponn yang menentukan kualitas *governance*. Kepercayaan sosial merupakan aset



berharga yang berfungsi sebagai perekat bahkan merupakan prasyarat untuk mencapai masyarakat madani yang demokratis.

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Bhatta dan Gambir, tahun 1996 adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum, manajemen kompetensi, dan hak asasi manusia (HAM). Prinsip *good governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme), tahun 1997 adalah partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik. Azas *good governance* menurut undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Azas *good governance* menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 20 tentang azas penyelenggaraan negara adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu melaporkan obyek penelitian dengan cara menggambarkan dan memaparkan keadaan sesuai dengan kenyataan yang ditemui dan tidak dimaksudkan untuk mengubah kesimpulan yang berlaku. Maksud utama dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang karakteristik dari obyek, kelompok obyek, lembaga (instansi), atau menggambarkan situasi yang terjadi

gerakan masyarakat sipil mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang.

## **2. Lokasi Penelitian**

Kota Malang dijuluki sebagai Kota Pendidikan karena terdapat banyak institusi pendidikan formal maupun non formal dan pendidikan negeri maupun swasta, mulai Play Group hingga perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan di Kota Malang tergolong sangat maju. Informasi Teknologi dan lingkungan yang kondusif sangat mendukung untuk menimba ilmu. Karena itu, terdapat banyak warga pendatang dari berbagai daerah untuk studi di Kota Malang. Secara langsung, keadaan Kota Malang yang demikian memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan Kota Malang pada segala bidang. Kota Malang di isi oleh banyak ilmuwan, praktisi, dan aktivis sosial, politik, pemerintahan, budaya, dan seniman. Kota Malang didiami oleh mayoritas masyarakat intelektual. Tidak heran, di Kota Malang terdapat banyak organisasi masyarakat sipil seperti LSM, Partai Politik, Lembaga-Lembaga Pendidikan Swasta, Organisasi Masyarakat, Himpunan Aktivis Pendidikan, dan Himpunan Masyarakat Dagang.

Keadaan Kota Malang seperti yang disebut di atas menjadi alasan peneliti memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian. Peneliti akan menggambarkan kemampuan gerakan masyarakat sipil kota malang mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang.

## **3. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber, dalam hal ini adalah orang-orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk

menjadi nara sumber data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data primer dari penelitian ini adalah unsur dan elemen yang mencakup dalam lingkup eksekutif, legislatif, dan civil society yang terkait paradigma good governance.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui arsip-arsip atau dokumen-dokumen resmi yang berupa catatan tertulis, literatur, buku-buku, internet, perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini, seperti UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang penyusunan APBD, Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

## 4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah:

1. 1 orang Ketua Malang Corruption Watch (MCW)
2. 1 orang Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang
3. 1 orang Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)
4. 2 orang Pengamat atau Akademisi Pemerintahan Kota Malang
5. 2 orang Praktisi Pemerintahan Kota Malang

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu: metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumenter. Masing-masing metode tersebut dijelaskan berikut ini:

1. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Menurut Burhan Bungin, wawancara dilakukan dengan bentuk:

(a) Wawancara individu dengan individu, yaitu wawancara yang dilakukan antara seseorang dengan lainnya, dan (b) Wawancara individu dengan kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan seseorang terhadap suatu kelompok<sup>26</sup>.

Penelitian ini akan menggunakan bentuk wawancara Burhan Bungin di atas dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan wawancara bertahap serta didukung dengan alat kelengkapan wawancara yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi tentang gerakan masyarakat sipil mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang.

2. Metode observasi.

Observasi atau pengamatan didefinisikan secara sederhana adalah aktifitas manusia dalam memahami dan mengetahui lingkungan sekitar dengan menggunakan pancaindra. Burhan Bungin mengatakan:

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit<sup>27</sup>.

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode observasi dalam penelitian adalah:

“...metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dengan kriteria: (a) pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius, (b) pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, (c) pengamatan dicatat

---

<sup>26</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) Hal. 111.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 115

secara sistematik dan dihubungkan secara proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang menarik perhatian, dan (d) pengamatan dapat dicek dan dikontrol melalui keabsahannya<sup>28</sup>”.

Dengan demikian, definisi observasi atau pengamatan dalam penelitian tidak sekedar mengamati lingkungan tanpa arah atau tujuan, namun mencerminkan asas ilmiah, terukur, profesional, dan sistematik. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan metode kelompok.

### 3. Metode dokumenter.

Semula metode dokumenter dikhususkan untuk meneliti sejarah, namun dewasa ini para peneliti sering menggunakan metode dokumenter untuk menelitian tentang fenomena sosial, politik, dan kebijakan. Metode dokumenter digunakan untuk mendukung atau melengkapi data hasil wawancara dan observasi, dan atau sebaliknya untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan wawancara dan observasi dengan informan penelitian. Data-data dokumenter berupa: kliping, foto, arsip kebijakan, dan tulisan opini terkait dengan topik penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara berikut ini<sup>29</sup>:

1. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber melalui observasi, wawancara, studi dokumen dan sebagainya, dibaca dan ditelaah dengan seksama untuk dijadikan acuan berfikir serta mencari solusi yang tepat, dan pada penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan hasil data yang valid.
2. Data yang telah terkumpul, direduksi sehingga tersusun secara sistematis, akan lebih nampak pokok-pokok terpenting menjadi fokus penelitian, guna memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap fenomena yang diteliti.

---

<sup>28</sup> Ibid., hal. 115

<sup>29</sup> Fasial Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asah Asih Asuh , Malang.

3. Data yang direduksi, di susun dalam satuan-satuan yang berfungsi untuk menentukan atau mendefinisikan kategori dari satuan yang telah dikategorikan akan diberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan pengendalian data dan penggunaannya setiap saat, sehingga dapat dijadikan pijakan untuk mempermudah penelitian.

**F. MODEL GERAKAN SOSIAL MCW DI KOTA MALANG: Suatu Model Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aras Lokal**

Studi tentang gerakan sosial dewasa ini cukup mendapatkan perhatian serius dari kalangan praktisi akademisi, politik, sosial, dan aktivis mahasiswa. Perhatian itu mengikuti perkembangan gerakan sosial semakin hari semakin meluas dan menguat dengan visi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Terbentuknya gerakan sosial di berbagai daerah selalu berawal dari warga yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Warga Negara itu kemudian membentuk komunitas yang selanjutnya disebut sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*).

Pada bagian ini peneliti menguraikan sepaik terjang masyarakat sipil (MCW) di Kota Malang dalam melakukan gerakan sosial dengan misi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Gerakan sosial MCW tidak terbentuk dengan sendirinya, namun diawali dengan berbagai upaya dari berbagai aktor yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aktor seperti ini disebut oleh Antonio Gramsci sebagai Intelektual Organik, yaitu warga negara yang mampu mentransformasikan dan mempraktikkan gagasan kerakyata pada kehidupan masyarakat. Kemampuan intelektual aktor-aktor itu selanjutnya membentuk sebuah komunitas (MCW) yang dijadikan oleh

mereka sebagai kendaraan bersama untuk melakukan gerakan sosial dalam berbagai bentuk kegiatan, program, dan aksi.

Peneliti memandang untuk menjawab atau mengetahui pokok persoalan dalam penelitian ini “Model Gerakan Sosial MCW” dibutuhkan kajian historis sebagai langkah awal untuk memahami persoalan tersebut. Karena itu, pada bab pembahasan ini tim peneliti terlebih dahulu menjelaskan sejarah terbentuknya gerakan sosial MCW, nilai-nilai (ideologi) gerakan sosial MCW, bentuk-bentuk aksi MCW, dan model gerakan sosial MCW di Kota Malang.

### **A. Sejarah Gerakan Sosial MCW**

Munculnya gerakan sosial tidak lepas dari peran aktor intelektual, yaitu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang hak warga negara dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Aktor intelektual itu biasanya muncul di komunitas pendidikan seperti perguruan tinggi, organisasi politik, organisasi profesi, dan organisasi sosial keagamaan. Dari berbagai organisasi itu mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang berbagai persoalan seperti persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan pengetahuan dan pengalamannya itu, mereka tersadarkan untuk terus mengorganisasi diri dalam bentuk berbagai organisasi untuk melakukan gerakan sosial.

Berdirinya organisasi Malang Corruption Watch (MCW) juga tidak lepas dari peran aktor intelektual. Aktor intelektual yang membentuk MCW datang dari dunia kampus. Mereka itu adalah aktivis mahasiswa, mantan aktivis mahasiswa, dan dosen. Mereka-mereka itu mengasah ide dan gagasan dari berbagai buku dan diskusi baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus seperti di warung kopi, warung nasi, kontrakan, dan kos-kosan.

Gagasan mendirikan Malang Corruption Watch (MCW), yang berawal dari komunitas diskusi para aktivis, yaitu ada aktivis mahasiswa, mantan aktivis mahasiswa dan beberapa dosen yang *concern* pad pemantauan kebijakan di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang) (Profil MCW, dalam buku Panduan Advokasi Pelayanan Publik, 2013).

Beberapa aktivis itu membangun gagasan dan opini melalui forum diskusi. Pada saat itu mereka fokus membicarakan dinamika politik dan ekonomi dalam naungan kekuasaan otoriter, Soeharto. Dalam teori gerakan sosial, terbentuknya gerakan sosial tidak lepas dari kondisi buruk (politik dan ekonomi) pada lingkungan dimana gerakan sosial itu nantinya terbentuk. Aktivis-aktivis itu membicarakan kondisi politik dan ekonomi, dimana pada saat itu isu kemiskinan dan korupsi menjadi konsumsi publik dan dipertontonkan disetiap saat. Kemiskinan dan korupsi adalah dua isu penting pemicu gerakan sosial termasuk di Malang Raya.

Komunitas diskusi ini (embrio terbentuknya MCW) sudah berjalan sebelum reformasi 1998 berlangsung. Kemudian pada akhir tahun 1999, komunitas diskusi ini lebih focus pada agenda-agenda pemantau dan pemberantasan korupsi. MCW lahir didasari oleh suatu kenyataan terjadinya praktik-praktik KKN di Malang Raya, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Praktik KKN hamper terjadi disemua sector penyelenggara negara di daerah seperti pemerintah daerah, parlemen (DPRD) maupun lembaga judicial, yang dibarengi dengan tidak adanya kemauan politik untuk memberantas KKN secara menyeluruh, yang pada akhirnya proses pembangunan ekonomi dan sosial politik tidak dapat dinikmati oleh rakyat secara adil (Lutfhi Jayadi, Pendiri MCW).

Sedikit uraian pada paragraf terakhir menggambarkan lahirnya MCW adalah bentuk respon para aktivis terhadap kondisi sosial politik di tahun sebelum 1998. Selain itu, menurut kami lahirnya MCW bentuk dari apreseasi gerakan aktivis lokal terhadap gerakan aktivis melalui organisasi-organisasi swadaya masyarakat di tingkat nasional. Hal ini terlihat jelas pada nama dan bentuk gerakan MCW yang hampir sama dengan bentuk gerakan ICW (Indonesia Corruption Watch).

Teten Masduki yang saat itu menjadi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), dianggap menjadi ikon anti korupsi di Indonesia, sehingga menghadirkannya dalam deklarasi MCW merupakan sebuah keutamaan. Sayang, menjelang deklarasi, Teten harus melakukan pelarian hingga ke luar pulau akibat dicari militer. Hal ini terkait peran Teten dalam membongkar kasus suap Jaksa Agung Andi M Ghalib. "MCW ini adalah sahabat ICW..." tegas Teten saat deklarasi MCW, 31 Mei 2001 (Hesti Rahmadhani dalam buku *Ilusi Demokrasi Lokal*, 2014).

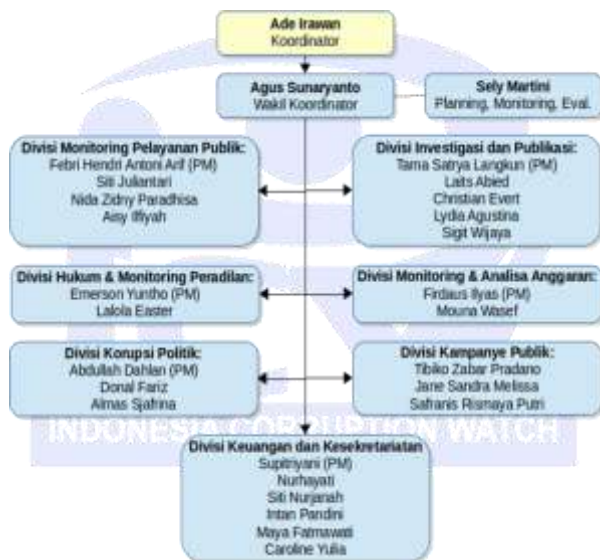
Gerakan aktivis anti korupsi di tingkat nasional memberi pengaruh besar berdirinya MCW di Kota Malang. Sehingga nama dan bentuk struktur organisasi ICW dan MCW



hampir sama. Hal ini menunjukkan kesamaan visi dan misi dalam melakukan gerakan social untuk mewujudkan cita-cita yang sama, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan profesionalitas, berkeadilan, partisipatif, transparan, dan mampu menegakkan hukum secara baik dan benar.

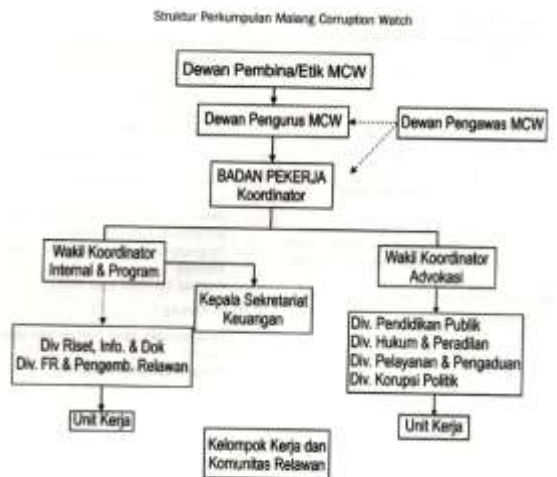
**Bagan F.1.** Kesamaan Struktur ICW dan MCW

Struktur ICW, 2014



Sumber: <http://www.antikorupsi.org/>,2014.

Struktur MCW, 2014

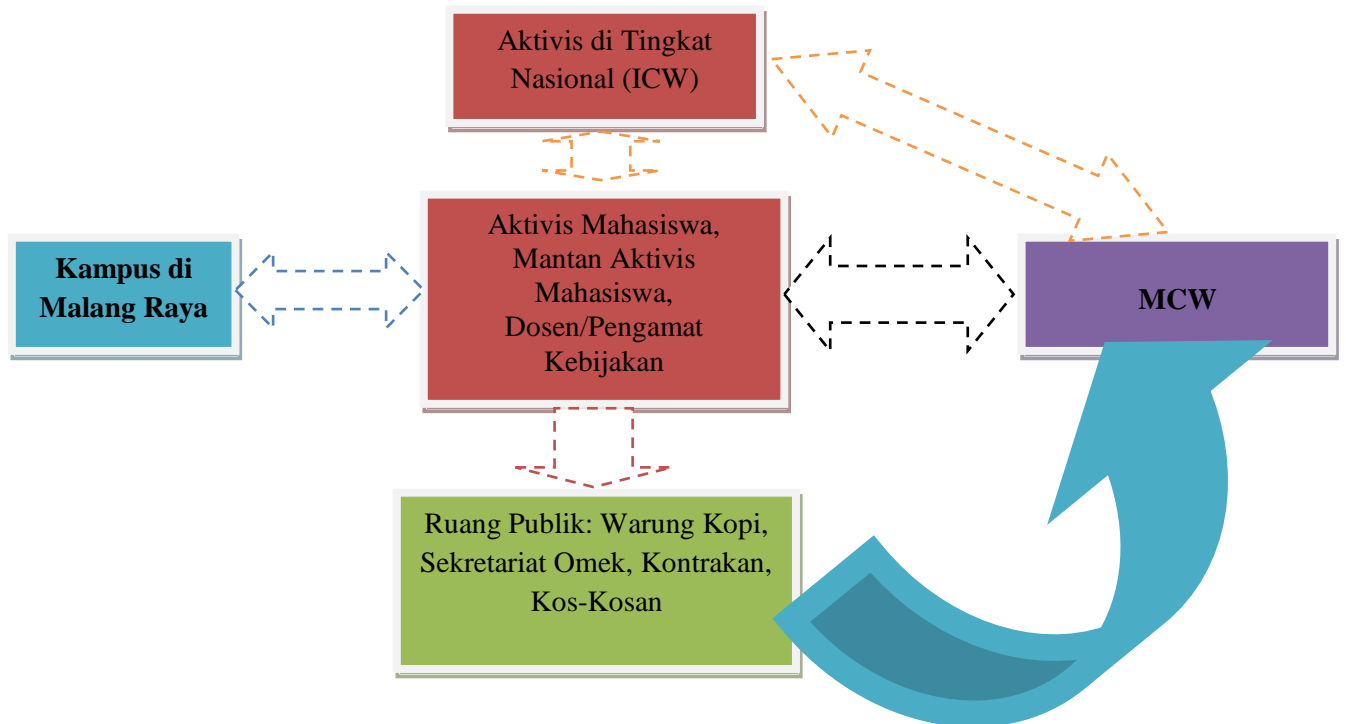


Sumber: Buku Profil MCW, 2014.

Kami dapat mengatakan, MCW adalah *diaspora* dari gerakan sosial ICW. Bentuk dan pola gerakan ICW selanjutnya diikuti MCW di Kota Malang secara sistimatis. Bahkan selanjutnya MCW juga melakukan diaspora jaringan gerakan layaknya dilakukan ICW terhadap MCW. Jaringan gerakan seperti ini menunjukkan bentuk dari komitmen kolektif dari para aktivis masyarakat sipil untuk mewujudkan kekuatan dalam mewujudkan keadilan, demokrasi, dan pemerintah yang baik dan bersih dari praktik KKN.

Dapat dijelaskan MCW lahir melalui proses dinamisasi gerakan aktivis akademisi, dan merupakan diaspora dari gerakan aktivis anti korupsi di tingkat nasional. Berikut kami menggambarkan proses kelahiran MCW.

**Bagan F.2.** Proses Terbentuknya MCW



Kini MCW menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang dinilai berperan penting dalam melakukan advokasi dan edukasi guna mewujudkan good governance di Kota Malang khususnya. MCW menempatkan diri sebagai organisasi publik yang terbuka terhadap para aktivis manapun yang ingin mengabdikan dirinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, melawan koruptor, dan mewujudkan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Siapapun boleh menjadi aktivis MCW selama mempunyai kesamaan visi dan misi dalam agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, MCW adalah lembaga sosial yang independen non partisan dan terbuka memfokuskan pada pemantauan/pengawasan korupsi, advokasi dan pemberdayaan serta melakukan pendidikan publik (Lutfhi Jayadi, Pendiri MCW).

Sebagai organisasi masyarakat sipil tentunya MCW membangun gerakan sosial secara sistimatis dan terstruktur serta terukur dengan baik. Hal ini tergambar dari kelembagaan MCW yang memiliki visi, misi, nilai-nilai ideologis, dan program strategis MCW sebagaimana berikut ini.

Visi MCW, yaitu terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat dan berdaulat dengan meupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Visi tersebut diwujudkan dalam Misi sebagai berikut “Melakukan monitoring dan investigasi kasus korupsi serta melakukan pendidikan public untuk membangun gerakan sosial anti korupsi melalui zona-zona antikorupsi. Visi-Misi tersebut berlandaskan pada nilai-nilai kerja MCW berikut ini:

1. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan
2. Tidak boleh menerima sumbangan berbentuk apapun dan kerjasama program dengan obyek pantau
3. Dalam melakukan tugas pemantauan harus minimal berdua
4. Menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, independen dan non partisan.

Nilai-nilai di atas juga menjadi penuntun para aktivis atau pegiat dalam menjalankan program MCW berikut ini:

1. Melakukan monitoring, investigasi dan advokasi kasus-kasus korupsi di bidang pelayanan publik dasar, parlemen daerah dan monitoring kinerja kejaksaan
2. Melakukan penguatan jaringan untuk membentuk zona-zona antikorupsi dan pos pengaduan
3. Melakukan pendidikan publik untuk membangun kesadaran kritis rakyat guna melawan koruptor
4. Melakukan *public fund raising* untuk membangun kemandirian lembaga.

Pegiat atau aktivis MCW harus mampu memahami dan mempraksiskan arah gerakan (visi,misi,nilai, dan program MCW) yang sudah ditentukan bersama sejak MCW dideklarasikan sebagai organisasi publik non pemerintah. Seorang aktivis MCW tidak cukup

memahami arah gerakan namun juga harus mampu menjiwai dan mengaktualisasikan arah gerakan itu secara nyata dalam kesehariannya sebagai aktivis *civil society*. Dalam perjalanannya MCW menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tidak hanya datang dari luar MCW, justru tantangan terberat adalah tantangan internal.

Tantangan internal berupa keteguhan dan keyakinan hati para aktivis untuk menjalankan nilai-nilai perjuangan secara totalitas dan penuh tanggungjawab. Aktivis MCW harus mampu menjiwai nilai-nilai perjuangan secara nyata. Hal ini perlu dimiliki aktivis MCW mengingat cita-cita sosial MCW untuk mewujudkan peradaban yang berkemajuan untuk bangsa dan negara. Tidak mungkin MCW mampu mewujudkan cita-cita sosialnya itu, tanpa didukung komitmen aktivisnya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan.

Cita-cita sosial MCW yaitu membentuk satu masyarakat yang berkeadaban (*civility*), berpengetahuan, dan mempunyai keberanian dalam menyampaikan kepentingan politiknya yang berkaitan dengan hak-hak asasi sebagai warga negara. Untuk itu, dalam konsepsi MCW misalnya, kantor atau sekretariat harus menjadi “rumah bersama bagi siapapun”, yaitu sebagai tempat yang nyaman untuk belajar bersama dan berbagi pengetahuan melalui beragam aktifitas pembelajarannya. Memperjuangkan hak warga negara harus dilakukan dengan semangat dan suka cita, karena inilah sebenarnya perjuangan kemanusiaan (Luthfi Jayadi, Pendiri MCW).

Pernyataan pendiri MCW tersebut di atas memperkuat bahwa nilai perjuangan aktivis gerakan yaitu tiada lain kecualia memanusikan manusia. Gerakan itu dilakukan untuk melawan ketidakbenaran, kediktatoran, dan kekejaman sosial politik, sehingga menuju kehidupan yang lebih mulia yaitu memanusikan manusia. Aktivis MCW harus menyadari makna dan hakikat gerakan yang memanusikan manusia. Jika ada aktivis MCW melakukan penyimpangan dari nilai-nilai dasar perjuangan maka harus segera ditindaklanjuti berdasarkan aturan organisasi yang berlaku, dan bahkan melalui proses hukum.

MCW pernah memiliki aktivis yang melakukan penyimpangan. Aktivis itu menerima suap dari pemerintah yang melakukan tindakan korupsi. Aktivis itu ternyata betul-betul melakukan penyimpangan sehingga kami sepakat untuk mengeluarkan dari MCW. Kami tidak mau menodai perjuangan kemanusiaan. Jika aktivis tidak siap menghormati itu maka sebaiknya menyingkir dari perjuangan. Ini

perjuangan kemanusiaan. MCW juga tidak segan-segan memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada anggotanya, termasuk jaringannya, jika kedapatan melakukan curang dari seperti yang di sebut diatas .Pilihannya adalah harus keluar dari MCW. Selain itu untuk mempertanggung jawabkan prilaku nya jalur hukum pun dapat dilakukan . Nilai-nilai kerja yang ditetapkan tersebut telah menjadi ketentuan dasar yang tidak boleh di langgar oleh siapapun. Siapa yang melanggar harus mendapatkan sanksi, karena dalam perspektif MCW perjuangan untuk kebaikan dan kebenaran tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang di endapkan keberadaban .

Tindakan tidak ber tolak belakang dengan ucapan. Hal ini penting karena nilai-nilai yang dianut dan praktik yang dijalankan menjadi salah satu indikator untuk neminilai tingkat “kesehatan”” sebua NGO. Indikator lainnya adalah pola membangun tata kelola internal (*internal governance*). Bagi mcw misalnya, seperti pengambilan keputusan, transparansi, partisipasi, impersialitas dan tentu tidak partisan harus dipraktikkan. Hal ini adalah salah satu indkator bagi MCW sebagai organisasi masyarakat sipil (Luthfi Jayadi, Pendiri MCW).

Tantangan eksternal berupa perlawanan sistimatis dari pemerintah atau pihak yang memiliki otoritas kekuasaan dan kewenangan. Diawal berdirinya MCW pada tahun 1999-2001, pemerintah sangat sinis terhadap gerakan MCW. Pada saat itu MCW mengedepankan gerakan konfrontatif sehingga pemerintah merasa risih, dan menganggap MCW sebagai musuh. Pemerintah menganggap MCW adalah organisasi yang dianggap sebagai musuh dan harus dilawan dengan berbagai cara. Pemerintah membangun citra buruk, bahwa MCW adalah organisasi yang tidak lebih sebagai kritikus yang tak bermakna untuk kebaikan.

Sebagai aktor non pemerintah dalam lanskap politik lokal yang berperan mengawal transisi demokrasi khususnya di Malang Raya, MCW kerap menemui kesulitan dalam mendorong keterbukaan birokrasi terhadap pressure dari kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) dalam kehidupan politik sehari-hari yang dilakukan oleh para pemegang otoritas politik dalam merumuskan kebijakan publik. Realitas praktik politik yang demikian semakin memperlambat proses keterlibatan warga dalam permusan kebijakan publik yang akan dikeluarkan oleh pemerintah (Luthfi Jayadi, Pendiri MCW).

Tantangan-tantangan di atas dilawan MCW dengan membangun simpul warga negara dapat memperkuat relasi “*mandat sosial*” MCW kepada masyarakat. Dengan adanya mandat itulah maka MCW merasa tidak gagal berempati terhadap realitas yang dihadapi oleh

masyarakat. Dengan berpegang teguh pada ide “diaspora gerakan” itulah maka MCW selalu berusaha menengahkan budaya yang humanistik dalam membangun demokrasi dan keberdayaan warga di Malang Raya, dengan menekankan pada keseimbangan antara state dan society (Ilusi Demokrasi di Aras Lokal, 2014). Fase pola hubungan MCW dengan jaringannya sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

**Bagan VI.** Pola Hubungan MCW dengan Jaringannya

Periode Awal 2000-2002	Periode Konsolidasi 2003-2006	Periode Pelebagaan Gerakan Bersama 2006- 2014
Relasi Formal	Metekan Potensi Sekutu	Memperluas Ruang Publik Bersama
Pola hubungan di periode ini masih sangat formal, hanya sebatas pertemuan-pertemuan formal dalam acara/kegiatan yang diselenggarakan oleh MCW	Pada periode ini pola hubungan yang terjadi mulai terlihat dekat. Karena mekanisme hubungan yang terjadi melalui pendampingan kasus	Masa ini merupakan masa penguatan posisi rakyat/kelompok warga untuk memperluas keterlibatan warga dalam mengisi ruang-ruang publik. Terutama dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka dan mempengaruhi perumusan kebijakan publik.

*Sumber: Ilusi Demokrasi di Aras Lokal, 2014.*

Tantangan-tantangan yang ada dilawan MCW dengan berbagai cara. MCW tidak kehilangan arah perjuangan. justru MCW semakin matang menemukan jalan perjuangan. Dari pengalaman-pengalaman itu MCW menemukan pola gerakan yang lebih masif dan bermartabat. Di bawah ini akan dijelaskan pola gerakan MCW untuk mewujudkan visi, misi, dan cita-cita yang diinginkan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

## **B. Model Gerakan Sosial MCW**

Pola gerakan sosial MCW pada umumnya terlihat dalam dua bentuk gerakan yaitu gerakan konfrontatif dan gerakan negosiasi. Pola gerakan konfrontatif dominan diterapkan pada awal berdirinya MCW. Gerakan konfrontatif dimaksud adalah gerakan sosial yang dilakukan secara langsung untuk melawan ketidakbenaran pemerintah. Gerakan ini berupa investigasi dan demonstrasi. Pola gerakan ini sebagai upaya perlawanan serius MCW terhadap berbagai kasus korupsi yang ada di Malang Raya. Harapannya dengan gerakan konfrontatif pemerintah dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya.

Pola gerakan dan pola relasi yang terjadi secara garis besar menjadi dua arah yaitu, pertama, *konfrontatif (fron linier)*, artinya segala aktifitas advokasi yang dilakukan mengambil jarak yang sangat tegas (membangun kemandirian yang kuat) dihadapan struktur negara. Asumsi dasar yang dipakai adalah kesalahan bukan pada rakyat namun biang kesalahan adalah ada pada struktur negara (Luthfi Jayadi, Pendiri MCW).

Pola gerakan kedua, mulai kembangkan pola relasi dua arah meskipun tetap pada pola kerja awalnya yaitu konfrontatif, namun dalam beberapa hal untuk mempengaruhi kebijakan yang sedang di proses di lembaga-lembaga politik formal di Malang Raya, maka merubah cara yaitu dengan melakukan "negosiasi bermartabat" yaitu melalui bentuk-bentuk kegiatan- kegiatan berdiskusi publik yang mengundang pejabat politik ataupun pejabat birokrasi, masukan melalau paper atau naskah akademik dengan ,memanfaatkan saluran-saluran formal seperti hearing, konsultasi publik maupun melalui konferensi pers untuk menyampaikan pendapatnya kepada publik.

Dikatakan negosiasi bermartabat karena, proses komunikasi politik dengan para pemegang otoritas politik birokrasi dilakukan tetap mengedepankan etika moral yaitu menghindari curang ongkos mengongkosi, dan menerima dalam bentuk fasilitas apapun batasan etika moral tersebut perlu mengingat MCW kerap terkena dampak adanya praktik

yang di lakukan oleh organisasi non pemerintah di malang raya yang melakukan pemerasan terhadap obyek pantaunya atau para pejabat politik dan birokrasi di semua tingkatan.

Berikut gambaran sederhana pola relasi mcw dengan struktur negara dalam melakukan gerakan sosial bersama dengan kelompok-kelompok dampungannya.

**Bagan F. 3.** Periodisasi MCW Membanun Gerakan Sosial 2000-2013

2000-2005	2005-2013
Pola Gerakan <i>Konfrontatif-Frontlinier</i>	<i>Konfrontatif</i> dengan kombinasi dialog (Negosiasi-bermartabat)
Konsolidasi internal	Proses pengorganisasian massa
Kampanye eksistensi lembaga	Kapasiti building untuk jaringan
Mengidentifikasi potensi kelompok warga yang dapat menjadi sekutu dan kelompok mana saja yang berpotensi melemahkan gerakan MCW	Membentuk (mengorganisir) simpul-simpul warga dengan metode forum warga/simpul belajar warga
Melakukan kerja-kerja investigasi kasus korupsi	Investigasi dengan menggunakan metode-metode pengetahuan yang melibatkan warga
	Menggerakkan dan memfasilitasi kelompok warga untuk berdialog, bernegosiasi, berdemonstrasi kepada pemegang otoritas politik (kebijakan) maupun kepada pejabat birokrasi
	Melakukan konsolidasi jaringan secara masif untuk mempercepat terjadinya pelembagaan gerakan sosial anti korupsi melalui pembentukan pos pengaduan/zona-zona anti korupsi

Sumber: MCW, *Ilusi Demokrasi di Aras Lokal*, 2014.

### C. Bentuk-Bentuk Aksi MCW

Memperjuangkan perubahan tentu memerlukan gagasan. Tak akan pernah terjadinya perubahan yang tidak didahului dengan adanya gagasan. Membangun gagasan adalah adanya upaya mendekatkan asa yang akan dicapai. Namun demikian, gagasan tak akan terwujud jika tidak ada tahapan-tahapan yang dapat dioperasionalkan, karena dengan melaksanakan gagasan maka cita-cita akan mudah dicapai. Ungkapan inilah kiranya menjadi spirit bagi para pegiat MCW untuk selalu bergelora dalam melaksanakan upaya-upaya pencapaian cita-cita



MCW. Para pegiat MCW menyadari bahwa menjaga kontinuitas dan keluasan cakupan gagasan tidaklah mudah, namun gagasan awal bahwa gerakan anti korupsi harus terlembaga menjadi gerakan rakyat terus dilakukan secara masif dalam gerakan antikorupsi melalui pembentukan zona antikorupsi. Sebagai contoh, gagasan untuk melibatkan publik. Sedari awal gagasan tersebut telah dilakukan yaitu dengan membentuk pos-pos pengaduan yang berbasis individu atau kelompok warga di rumah dan di kampung-pampung dan melaksanakan forum warga di sekitar kampung di mana relawan MCW tinggal (MCW, *Ilusi Demokrasi di Aras Lokal*, 2014).

Setiap aktivitas tersebut selalu dikhidmatkan untuk dapat memberikan stimulus bagi rakyat akan membangun kesadaran kritisnya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas advokasi maupun manajemen perkantoran/administrasi di MCW harus mampu melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru bagi masyarakat umum dan khususnya bagi kelompok dampingan MCW. Untuk itu, kegiatan MCW harus selalu mempunyai perspektif pendidikan, karena pendidikan adalah bagian dari proses politik untuk menyebarkan pesan bahwa kekuasaan berfungsi untuk menghadirkan kesejahteraan melalui sebuah relasi antara bahasa dan kebudayaan dalam menentukan identitas dari sebuah masyarakat-bangsa. Bangunan konsepsi MCW dalam melakukan pendidikan publik adalah agar masyarakat dan bangsa mempunyai daya gerak, daya juang dan tak hanya memikirkan simbolitas saja. Oleh karena itu, model pendidikan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kultural dengan harapan akan tumbuh sebuah proses reproduksi kultural kelompok-kelompok warga untuk dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya (MCW, *Ilusi Demokrasi di Aras Lokal*, 2014).

Berikut ini contoh-contoh kegiatan MCW dalam melakukan gerakan sosial untuk mempengaruhi kebijakan publik (khususnya kebijakan APBD) di Kota Malang.

1. Optimalisasi peraturan hukum, *moral force*, dan penumbuhan *good will*

Menurut Suaib, penggerak FMPP<sup>30</sup> Kota Malang, pandangan penghapusan fungsi anggaran DPRD adalah upaya penghianatan demokrasi. Karena itu, penghapusan fungsi anggaran DPRD tidak patut dilakukan. Menurutnya, pertauran hukum yang dibuat pemerintah selama ini sudah memberikan peluang masyarakat untuk ikut terlibat dalam kebijakan negara termasuk kebijakan anggaran daerah. Tetapi peraturan hukum dibuat belum optimal diimplementasikan dengan baik karena belum ada kemauan baik dari pemerintah terutama DPRD sebagai wakil rakyat. Karena itu, langkah utama yang harus dilakukan adalah optimalisasi peraturan hukum dan penguatan gerakan moral (*moral force*) melalui pembenahan perilaku politik masyarakat dalam memilih DPRD.

Karena kalau kita lihat peraturan perundang-undangan mulai pelayanan publik, HAM, itu sangat-sangat baik, yang tidak baik itu moralnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membangun moral struktur? Kita mulai membenahi politik walaupun kita tidak ikut langsung pada partai politik tapi kita ini partisan. Politik itu mempunyai tiga fungsi: pengawasan, hukum, dan anggaran. Kan sudah jelas, ya ini, memulainya darisini. Apapun kita diatur oleh politik, ya salah kita senang politik. Sadar atau gak sadar kita ini diatur oleh politik. Termasuk proses musrenbang dan APBD bagian dari proses politik, Cuma proses politik kita inikan masih tidak baik. Musrenbangkel, tatacara memberikan masukan ttng program yang ada di wilayah masing-masing, itukan salah satunya harus melibatkan anggota DPRD, karena anggota DPRD sebagai saksi yang kuat, tapi kan gak pernah. Nah disini ada (Buku Panduan Musrenbangkel-Pen) harus melibatkan DPRD, melibatkan guru<sup>31</sup>.

Searah dengan pernyataan Suaib di atas, Lokh Mahfud menjelaskan untuk menjalankan pertauran hukum yang ada dibutuhkan pengawasan internal dari dalam diri pemerintah dan politisi masing-masing. Menurutnya, pengawasan bukan melalui sistem pemerintah tetapi bagaimana kemauan baik pemerintah dan politisi untuk menjalankan sistem atau peraturan hukum yang ada, sehingga peraturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Berikut penjelasan Lokh Mahfud:

Cara yang dilakukan adalah pengawasan. Tetapi bukan pengawasan atau control seperti kita pahami selama ini. Bukan orang mengawasi orang atau masyarakat mengawasi pemerintah, tetapi pengawasan diartikan bagaimana sikap dan perilaku mengawasi orang. Bagaimana sikap Pemerintah, DPRD, dan elemen-elemen lain

---

<sup>30</sup> FMPP adalah organisasi bentukan MCW.

<sup>31</sup> Suaib, *Op.Cit.*, 20 Maret 2013

memiliki good will dalam menjalankan amanah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selama ini good will belum dimiliki oleh pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Setelah dilakukan musrenbang terdapat program kegiatan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat, hasil ini harus diawasi oleh sikap amanah tadi. Hal ini yang belum kita miliki, sehingga sulit mewujudkan kebijakan anggaran yang baik. Partai yang beralbelkan islam-pun tidak menjamin memiliki sikap amanah, mulutnya mengatakan tidak tetapi tangannya berharap untuk diberi bagian dari kebijakan anggaran itu.

Menurut Suaib, banyak anggota dewan tidak memiliki pemahaman baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik termasuk dalam tata kelola kebijakan anggaran. Karena itu, dibutuhkan kecerdasan politik masyarakat dalam memilih anggota dewan. Membangun kecerdasan politik masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan. Berikut penjelasan Suaib:

Makannya nanti kami sama teman-teman MCW mau mengadakan pendidikan politik disetiap kecamatan kota malang ini, nah kita mau dilibatkan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pola memilih, dan mengawasi tindakan-tindakan calon. Saya dilibatkan disana, itu bukan pekerjaan ringan. MCW kan orang-orang luar, jadi masih kurang pahan tentang karakter orang-orang malang dan wilayah di daerah malang<sup>32</sup>.

Diakui Suaib, ditengah sikap apatis masyarakat, penerapan pendidikan politik bukan pekerjaan mudah namun dibutuhkan langkah kolektif dari masyarakat sipil seperti MCW dan media massa. Saat ini, diuntungkan adanya sistem demokrasi yang memberikan kesempatan masyarakat untuk publikasi sehingga mempermudah penguatan pendidikan politik. Suaib menjelaskan:

Ya seperti saya bilang tadi sangat berat, apalagi mulai tahun 1955 hingga sekarang ini baru muncul yang namanya pendidikan politik calon pemilih. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tidak Nampak, tidak jelas, tidak kelihatan, karena antarlain alat komunikasi pada waktu itu juga kurang. Sekarang komunikasi politik sudah sangat luas missal kominikasi lewat Koran , lewat TV, lewat internet, bahkan lewat seminar dan workshop, dan segala macam, kan sudah sangat terbuka. Posisi masyarakat dengan adanya itu, masyarakat masih aja pesimis.

Penjelasan Suaib (aktivis pendidikan), pernyataan salendra (sebagai birokrat kota malang), dan pernyataan Lokh Mahfud (anggota banggar DPRD Kota Malang) tertuju

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 20 Maret 2013

pada satu persoalan yaitu minimnya kesadaran dan kemauan baik (*good will*) pemerintah, politisi, dan masyarakat untuk menjalankan peraturan hukum yang berlaku. Menurut Suiab, pemerintah, politisi, dan masyarakat perlu disadarkan melalui pendidikan politik.

## 2. Pengorganisasian masyarakat, membentuk *block historis*

Pendidikan politik dianggap sebagai kekuatan penting dalam membangun kesadaran kolektif (*block historis*) sehingga menjadi kekuatan hegemoni untuk menyeimbangi kekuatan dominasi negara. Langkah MCW membentuk FMPP (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan) adalah bentuk upaya membangun kesadaran kolektif untuk menyeimbangi kekuatan pemerintah dan politisi di Kota Malang melalui kegiatan monitoring dan advokasi. Umarul Faruk, koordinator pendidikan politik dan anti korupsi MCW, menjelaskan:

Forum masyarakat peduli pendidikan (FMPP) dibawah pengawasan MCW. FMPP didirikan untuk menjalankan fungsi monitoring dan advokasi khususnya pada bidang pendidikan. Dulu FMPP memiliki koordinator yang mengatur pelaksanaan kegiatan di lapangan, namun setelah dievaluasi dan atas kejadian yang ada coordinator sering bermain-main, sehingga MCW mengadakan rapat dan menghasilkan FMPP tidak perlu coordinator. Jadi, FMPP diserahkan kepada MCW untuk mengendalikan namun FMPP tetap memiliki era otonom dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai advokasi dan monitoring. Ada kasus FMPP melakukan tindakan, namun ketika dijumpai persoalan pada penanganan kasus MCW turun tangan<sup>33</sup>.

Dalam menjalankan fungsi monitoring dan advokasi, FMPP didukung manajemen kemitraan dengan MCW. MCW mengawasi, mengarahkan, dan memberi edukasi kepada FMPP sehingga gerakan advokasi dan monitoring berjalan sistematis, masif, dan profesional. Selain berfungsi sebagai monitoring dan advokasi, FMPP menjadi pusat informasi publik. Umarul Faruk menjelaskan:

FMPP dikatakan sebagai sentral informasi publik karena itu FMPP ada di setiap wilayah atau kecamatan. Namun dalam menjalankan monitoring, antara FMPP di setiap wilayah melakukan koordinasi dan saling membantu. MCW ada ditengah sebagai monitor dan pendamping<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Umarul Faruk, *Op.Cit.*, 11 Maret 2013

<sup>34</sup> *Ibid.*, 11 Maret 2013

Karena itu, tujuan berdirinya FMPP adalah untuk menyeimbangi kekuatan pemerintah dan politisi Kota Malang dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan termasuk kebijakan APBD. Hubungan kemitraan antara FMPP dan MCW merupakan bukti adanya visi dan misi yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik untuk kepentingan masyarakat (kepentingan publik). Menurut Gramsci, masyarakat sipil yang berbasis gerakan kemasyarakatan akan mampu meraih kekuasaan hegemoni untuk mempengaruhi kekuasaan negara termasuk pemerintah dan politisi Kota Malang. Keberadaan MCW dan MFPP berdampak besar terhadap perilaku birokrasi di Kota Malang sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian terakhir pembahasan penelitian ini.

### 3. Penguatan forum *deliberatif* masyarakat sipil

Diberbagai forum diskusi yang peneliti ikuti, dewan pembina MCW (Luthfi Jayadi)<sup>35</sup> selalu mengatakan pentingnya forum *deliberatif* untuk membangun kekuatan masyarakat sipil. Demokrasi tanpa forum *deliberatif* membuat sistem politik dan pemerintahan tidak berjalan efektif sesuai prinsip keadilan, persamaan, dan pemerataan.

Forum *deliberatif* dapat dibangun melalui kegiatan diskusi non formal seperti *cangkruan* di warung-warung kopi, dan diskusi formal melalui kegiatan workshop, FGD, dan seminar. Menurutnya, forum *deliberatif* diarahkan untuk memahami kepada masyarakat, politisi, pemerintah, ormas, LSM, dan pelaku usaha tentang hakikat kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Luthfi Jayadi menjelaskan:

Forum *deliberatif* sangat penting untuk merumuskan makna dan hakikat sebuah Perda (peraturan daerah-Pen). Seringkali Pemda membuat perda tidak dapat menjelaskan makna yang terkandung didalamnya dan makna-makna yang ada

---

<sup>35</sup> Diskusi MCW yang peneliti ikuti adalah : (1) FGD “membangun pola relasi pengambilan kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan” kerjasama dengan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unmuh Malang, tanggal 18 oktober 2012 di Hotel Pendidikan Unmuh Malang. Peserta yang hadir pada FGD tersebut adalah LBH Surabaya, Fatayat Kab. Malang, Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, NGO Harum, PD I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmuh Malang, dan Diknas Pendidikan Kota Malang. (2) Diskusi “Hilangnya Etika Pemimpin Dalam Membangun Fondasi Demokrasi”, 20 Desember 2012 di Ruang Sidang FISIP Unmuh Malang. Peserta yang hadir: Fakultas Hukum Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmuh Malang, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unmuh Malang. (3) FGD “Hasil Penelitian Dr.Tri Sulistyaningsih Tentang Kebijakan Tata Ruang Kota Malang”, 01 Maret 2013 di Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Peserta dari MCW, BKBPM Kota Malang, Dosen-Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unmuh Malang, dan Dosen-Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unmuh Malang.

tidak sesuai dengan perkembangan seperti definisi partisipasi. Definisi partisipasi harus diperjelas sesuai arah demokrasi dan dapat memposisikan masyarakat sebagai subjek kebijakan (Perda-Pen). Kami pun (MCW-Pen) belum memahami makna partisipasi. Selama ini kami melihat partisipasi sebagai bentuk kedermawahan seseorang atau kelompok seperti tokoh-tokoh masyarakat terhadap orang lain<sup>36</sup>.

Menurut Luthfi Jayadi, meskipun era sekarang adalah era demokrasi namun masih dijumpai perilaku paksaan pejabat negara melalui kebijakan termasuk peraturan daerah.

“...karena ada beberapa kasus, guru diadili pada kepolisian, hal ini hemat kami tidak baik, karena guru adalah seorang pengajar dan berdiri di depan murid tidak pantas diadili pada proses hukum. Ini perlu mekanisme khusus yang harus diatur pada Peraturan Daerah. Mekanisme yang digunakan adalah melalui pendekatan persuasif...”

Berdasarkan pantauan MCW, perilaku represif pemerintah daerah terjadi pada setiap level kebijakan termasuk kebijakan anggaran. APBD dibuat sepihak dan diterapkan untuk publik adalah bentuk paksaan negara terhadap warga negara. Di era demokrasi, paksaan negara terhadap warga adalah perbuatan yang diharamkan. Karena itu, Luthfi Jayadi mengatakan:

Nah ini sebenarnya kami mau kunci dengan bagaimana mekanisme yang sebenarnya sehingga kita memiliki peran, DPRD dan partai memiliki inisiatif untuk terbuka dengan masyarakat, Partai jangan menunggu disanjung dan dirayu terlebih dahulu baru baik dengan kita. Di Kota Malang belum ada mekanisme yang mengatur hal-hal tersebut. Ini yang kemudian diharapkan lahir pada FGD (forum deliberatif-Pen) ini<sup>37</sup>.

Forum *deliberatif* seperti penjelasan dewan pengawas MCW di atas terkait dengan konsep *block historis* Antonio Gramsci. *Block historis* adalah forum pendidikan rakyat untuk melakukan reformasi intelektual dan moral menuju kekuatan *kolektif* sebagai penyeimbang kekuatan *koersif*, *hegemoni*, dan *dominasi* negara.

---

<sup>36</sup> Luthfi Jayadi, Op.Cit.

<sup>37</sup> Ibid.

#### 4. Efek bola salju gerakan sosial masyarakat sipil

Gerakan sosial masyarakat sipil (MCW) melalui pengorganisasian masyarakat (FMPP), penguatan forum deliberatif, dan publikasi sangat berdampak positif bagi tumbuhnya masyarakat sipil di Kota Malang (meskipun tidak banyak). Hasil survei dan wawancara peneliti dengan koordinator FMPP menunjukkan adanya dampak positif gerakan sosial MCW terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam urusan publik termasuk dalam kebijakan anggaran. Suaib adalah binaan MCW melalui FMPP, mengatakan:

Wawasan itu saya gak punya tapi saya memiliki semangat untuk memiliki ilmu akhirnya kumpul dengan teman-teman yang memiliki wawasan seperti Mas Faruk. Itulah latar belakang saya, sehingga saya sering diajak seminar di UB, UM, UIN, Unisma, UMM, di Widya Gama, saya pernah diajari seorang teman Ibhnu Cahyo, beliau mengajarkan saya tentang citizen of Sweet, yaitu hukum bisa dilakukan perorangan, bisa dilakukan kelompok, dan bisa dilakukan secara kelembagaan. Tapi saya karena orang bodoh tapi saya tetap menggunakan konsep setiap orang bisa menggunakan hukum citizen of Sweet antara lain untuk mencari informasi publik sebelum adanya KIP. Setelah adanya KIP saya tambah senang, ini saya praktikkan<sup>38</sup>.

Penjelasan Suaib di atas terjadi perubahan pola pikir sebelum dan sesudah dilakukan pendampingan oleh MCW. Pola pikir cerdas membuat tingkat kekritisan dan keberanian dalam monitoring dan advokasi semakin tinggi. Menurut Antonio Gramsci, kecerdasan, keberanian, dan kekritisan masyarakat (Suaib) tersebut bentuk dari hasil gerakan sosial intelektual produktif. Hasil gerakan intelektual produktif akan tampak nyata dari adanya perubahan struktur negara karena adanya kecerdasan, keberanian, dan kekritisan masyarakat. Suaib menceritakan:

Pada tahun 2010, di wilayah kita ini ada gejala masalah musrenbang, pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Muncul kesadaran saya untuk mendorong agar masyarakat berani dan menuntut haknya, sehingga dapat melengserkan Lurah dengan cara audit, walaupun saya tidak paham audit tapi saya menggunakan bahasa atau cara sederhana, kalau uang sekian untuk program sekian maka hasilnya sekia, kalau uang sekian, diumumkan

---

<sup>38</sup> Suaib, *Op.Cit.*, 20 Maret 2013

sekian, berarti hasilnya sekian, begitu aja (cara-pen) yang saya pakai sehingga saya dapat melengserkan seorang lurah. Teman-teman MCW tau semua.

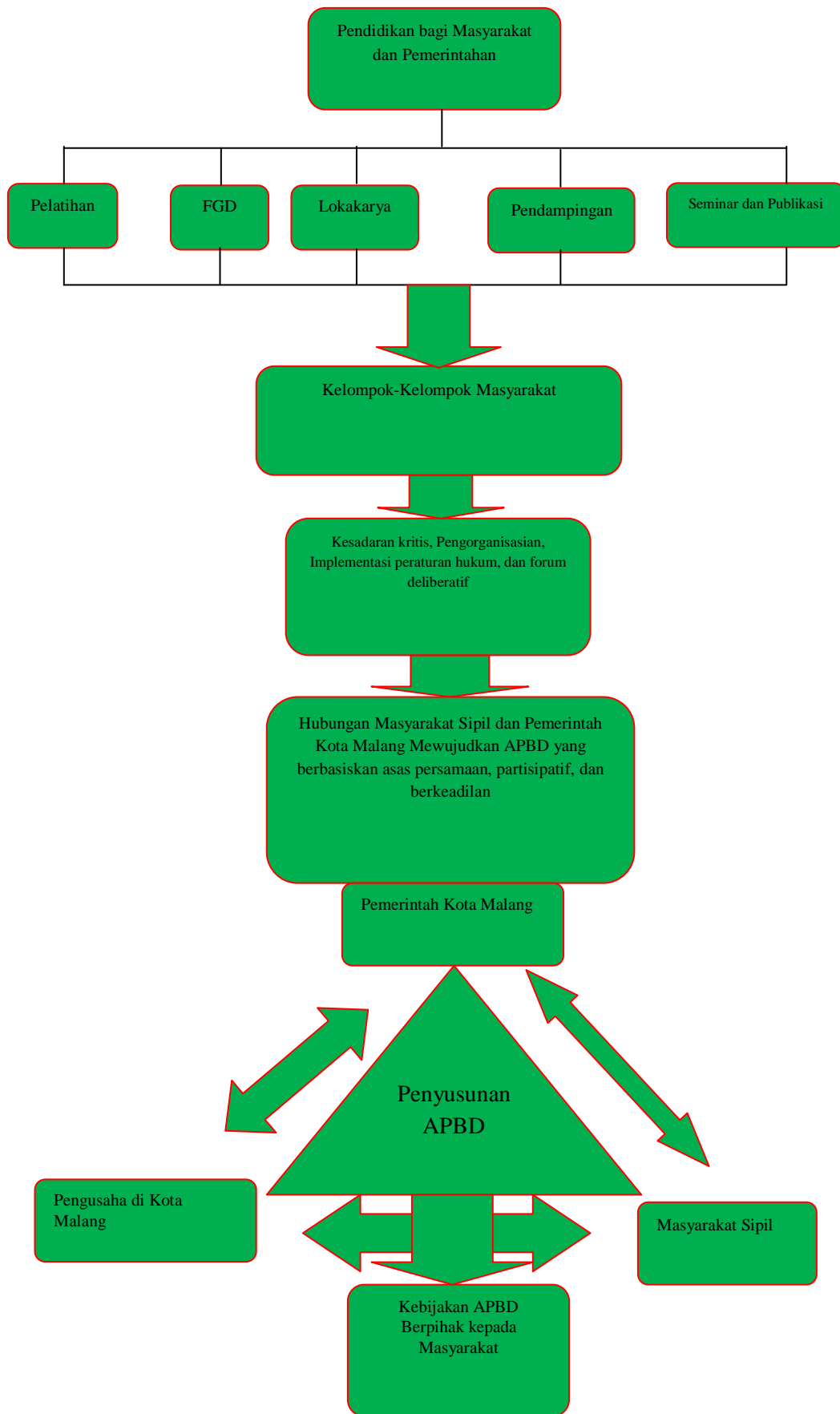
Karena itu, dibutuhkan kekuatan kolektif masyarakat sipil untuk membangun kesadaran, keberanian, dan kekritisian sebagai penyeimbang kekuatan politik dan pemerintah sehingga penyusunan kebijakan APBD dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Mewujudkan kebijakan anggaran daerah (APBD) yang berpihak kepada masyarakat, dibutuhkan hubungan baik masyarakat sipil dan pemerintahan daerah yaitu hubungan partisipatif, persamaan, dan berkeadilan. Hubungan partisipatif yaitu masyarakat sipil termasuk ormas ikut terlibat di dalam kegiatan musrenbang dan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RAPBD. Hubungan persamaan yaitu masyarakat sipil dan pemerintah daerah memiliki posisi yang sama dalam kegiatan musrenbang dan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RAPBD. Hubungan berkeadilan yaitu masyarakat sipil dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menyusun kebijakan APBD berdasarkan pada prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan di atas menggambarkan hubungan masyarakat sipil dan pemerintahan Kota Malang jauh dari hubungan partisipatif, persamaan, dan berkeadilan, justru sebaliknya yaitu hubungan *transaksional* dan *kolusifitas* antara elit politik dan birokrasi. Karena itu, di bawah ini digambarkan model menuju hubungan masyarakat sipil dan pemerintah yang menjunjung tinggi nilai partisipatif, persamaan, dan keadilan dalam penyusunan kebijakan APBD di Kota Malang sehingga berpihak kepada masyarakat.



**Bagan F.4.** Model Gerakan Sosial Masyarakat Sipil (MCW) dalam Mempengaruhi Kebijakan APBD



Kekuatan kolektif masyarakat sipil dapat dibangun melalui pendidikan seperti pelatihan, FGD, lokakarya, workshop, seminar, diskusi, dan publikasi melalui media massa dan buku. Kegiatan pendidikan tersebut untuk: (1) optimalisasi peraturan hukum, (2) menumbuhkan kesadaran kritis kolektif (4) penguatan organisasi masyarakat sipil, dan (5) penguatan forum deliberatif. Dengan demikian, secara langsung kekuatan kolektif masyarakat sipil akan terbangun sehingga mampu menyeimbangi perilaku *status quo*, *kolusifitas*, dan *transaksional* elit politik dan birokrasi, sehingga kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang dapat diarahkan untuk membiayai program sesuai kebutuhan masyarakat seutuhnya.

## **I. KESIMPULAN**

Model gerakan dilakukan ini diakui membutuhkan proses panjang untuk dapat melahirkan pemerintah kota Malang yang demokratis dan masyarakat kritis dan aktif dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan APBD Kota Malang. Kendati demikian, upaya-upaya yang dilakukan sudah mulai menampakkan hasil yang ditandai dengan terbentuknya keberanian masyarakat (meskipun masih sangat terbatas) untuk melakukan advokasi dan monitoring terhadap kinerja pemerintah Kota Malang. Langkah-langkah yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah:

1. Kesadaran kritis masyarakat dipandang sebagai syarat utama untuk membangun demokrasi didalam penyusunan kebijakan APBD. Kesadaran kritis masyarakat hanya dapat dibangun melalui sarana pendidikan seperti seminar, lokakarya, workshop, FGD, publikasi, dan pelatihan. Karena itu, optimalisasi pembangunan kesadaran kritis masyarakat melalui sarana pendidikan seperti yang telah dan sedang dilakukan MCW dan FMPP perlu diperhatikan dan didukung oleh semua unsur masyarakat sipil yang ada di Kota Malang

2. Masyarakat Sipil Kota Malang harus membangun kekuatan kolektif untuk bersama-sama memastikan kebijakan APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Malang. Kesadaran bersama (*kekuatan kolektif*) masyarakat sipil diyakini mampu menandingi kekuatan negara (*politisi* dan *birokrasi*) sehingga kebijakan dapat diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Malang.
3. Masyarakat Sipil Kota Malang dalam menjalankan fungsi *monitoring* dan *advokasi* terhadap kebijakan APBD, tidak memposisikan pemerintah sebagai lawan justru sebagai mitra untuk mewujudkan kebijakan APBD sebagai alat pemberdayaan masyarakat Kota Malang.
4. Sudah saatnya politisi dan birokrasi Kota Malang membuka diri kepada masyarakat sipil untuk bersama-sama menyusun kebijakan APBD yang berkeadilan dan bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Penerbit Averso Press Malang.
- Bocock, Robert. 2007, Cetakan Pertama. *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*. Penerbit Jalasutra, Bandung.
- Gaffar, Afan. 2006, Cetakan Keenam. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamidi. 2004, Cetakan Pertama. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit UMM Press Malang.
- Hadi Krishno. Laporan Penelitian 2006 dibiayai DPPM UMM. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*.
- Ibrahim, Anis. 2008, Cetakan Pertama. *Legislasi dan Demokrasi*. Penerbit In-Trans Publishing, Malang.
- Jones, Charles O. 1994, Cetakan Kedua. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara.
- J.Kurniawan, Luthfi. 2005. *Panduan Memahami APBD*. Diterbitkan Atas Kerjasama Malang Corruption Watch (MCW), YAPPIKA, Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi, Institute for Strengthening Transition Society Studies (In-TRANS), Jurusan Ilmu Pemerintahan-Laboratorium Ilmu Pemerintahan –FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

- Mahfud, Chairul. 2009, Cetakan Pertama. *39 Tokoh Sosiologi Politik Dunia Dari Socrates Sampai Barack Obama*. Penerbit PT. Temprina Media Grafika, Surabaya.
- Manan, Munafrizal. 2005, Cetakan Pertama. *Gerakan Rakyat Melawan Elit*. Penerbit Resist Book, Yogyakarta.
- Puspitosari, Hesti dkk. 2006. *Marginalisasi Rakyat Dalam Anggaran Publik, Partisipasi Rakyat Dalam Menyusun Anggaran Publik di Daerah*. Jakarta. Diterbitkan atas kerjasama Malang Corruption Watch (MCW), YAPPIKA, Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi.
- Suharmawijaya, Dadan S., dkk. 2007, Cetakan Pertama. *Membangunan Inisiatif Mendorong Perubahan, 10 Inisiatif Pelibatan Organisasi Islam-Ornop Dalam Mendorong Good Governance dan Anti Kemiskinan*. Diterbitkan dan Disponsori oleh The Asia Foundation.
- Simon, Roger. 1999, Cetakan Pertama. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Penerbit INSIST dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tim Simpul Demokrasi. 2006, Cetakan Pertama. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Penerbit PlaCID Averros dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi)
- Unaradjan, Dolet. 2000, Cetakan Pertama. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Penerbit PT Gramedia Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004, Cetakan Kesembilan. *Sistem Politik Indonesia*. Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Salahudin. 2012, Cetakan Pertama. *Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Litera Jogjakarta.
- Yuwono, Sony, dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Penelolan Keuangan Daerah) Dilengkapi dengan analisis Permendagri No.59/2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.

Sumber lain:

[www.pppodbrawijaya.com](http://www.pppodbrawijaya.com), *PPOTD*, 8 (delapan) Daerah di Jawa Timur Belum Sahkan APBD, diakses 01 Oktober 2012.

[www.setnasfitra.com](http://www.setnasfitra.com), “Kemampuan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran”, diakses 01 Oktober 2012

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara

## LAMPIRAN

Berikut ini adalah dokumentasi FGD “Penguatan Gerakan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan APBD Pro Rakyat di Kota Malang” Tanggal 23 November 2013 di Kantor Rumah Baca Cerdas Malang (RBC). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian untuk menyerap informasi bagaimana model gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan APBD Pro Rakyat di Kota Malang. Pada kegiatan ini hadir Ketua MCW (Zainuddin), Fungsiaris RBC (Iradat Takwa), Pengurus Partai Hanura Kota Malang (Ali Akbar), Akademisi FISIP UMM (Asep Nurjaman), dan aktivis HMI di Kota Malang.







